

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

L A P O R A N

NUSANTARA



JULI 2022

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

LAPORAN
NUSANTARA

JULI 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PRAKATA	iii
BAGIAN I Ringkasan Eksekutif	1
BAGIAN II Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah	5
BOKS 1 Ketahanan Pelaku Usaha dalam Menopang Pemulihan Ekonomi Nasional	17
BOKS 2 Optimalisasi Peran Fiskal Daerah untuk Mendukung Perbaikan Ekonomi dan Stabilitas Harga	19
BOKS 3 Ketahanan Pangan Mendukung Stabilitas Harga dan Berlanjutnya Pemulihan Ekonomi	21
BAGIAN III Isu Strategis: Memperkuat Momentum Pemulihan Pariwisata, Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional	23
BOKS 4 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Perluasan Sertifikasi CHSE SNI di Provinsi Sumatera Barat	30
BOKS 5 Tren <i>Digital Nomad</i> untuk Mendukung Pemulihan Pariwisata Bali	31
BOKS 6 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Nglanggeran, Desa Wisata Dunia	32
BOKS 7 Prospek Pengembangan Desa Wisata Marinsow Sebagai Pendukung DPSP Likupang	33
BOKS 8 Singkawang <i>Creative Hub</i> Untuk Penguatan Ekraf Pendukung <i>Cross Border Tourism</i>	34

Prakata

Berbagai aspek dalam perekonomian, termasuk dari perspektif kewilayahan, menjadi pertimbangan penting dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Publikasi Laporan Nusantara ini merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian dalam perspektif spasial yang disarikan dari hasil pembahasan yang komprehensif antara Dewan Gubernur dengan seluruh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Asesmen perekonomian spasial dalam publikasi ini didasarkan pada perkembangan perekonomian di lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Laporan Nusantara dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika terkini dan prospek perekonomian daerah, termasuk mengupas perekonomian wilayah di tengah mengemukanya tantangan global maupun domestik. Ketahanan lapangan usaha (LU) di tengah momentum perbaikan ekonomi, optimalisasi belanja daerah, serta ketahanan pangan untuk mendukung stabilitas harga dan berlanjutnya pemulihan ekonomi menjadi isu khusus dalam edisi kali ini. Publikasi Laporan Nusantara ini juga mengangkat isu strategis mengenai “Mendorong Momentum Pemulihan Pariwisata, Mendukung Penguatan Ekonomi Nasional”. Upaya untuk mendorong pemulihan kinerja pariwisata perlu terus ditempuh secara konsisten dan berkelanjutan didukung sejumlah kebijakan dan sinergi berbagai *stakeholders* guna mendukung perbaikan ekonomi nasional.

Sebagai penutup, kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah, sebagai salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi daerah, serta memberikan informasi spasial bagi masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita bersama untuk berkarya demi nusa dan bangsa, membangun untuk Indonesia Maju.

Jakarta, 22 Juli 2022

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Solikin M. Juhro
Direktur Eksekutif

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAGIAN 1

Ringkasan Eksekutif

Perbaikan ekonomi di berbagai daerah berlanjut pada triwulan II 2022, di tengah dinamika sejumlah tantangan terutama dari eksternal. Berlanjutnya perbaikan tersebut ditopang oleh peningkatan permintaan domestik seiring terkendalinya penyebaran kasus COVID-19 yang mendorong perbaikan mobilitas. Perkembangan ini didukung berlanjutnya vaksinasi dosis 2 dan *booster* serta stimulus kebijakan. Kinerja konsumsi maupun investasi diperkirakan terus membaik di tengah prospek ekspor yang tetap positif ditopang tingginya harga komoditas, meski lebih terbatas karena tekanan global. Konflik Rusia-Ukraina yang disertai pengenaan sanksi yang lebih luas, serta kebijakan *zero* COVID-19 di Tiongkok telah memicu gangguan rantai suplai. Kondisi tersebut terjadi di tengah meluasnya kebijakan proteksionisme sehingga mendorong kenaikan harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan tekanan inflasi di sejumlah negara. Hal ini direspons sebagian bank sentral dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang lebih akseleratif melalui kenaikan suku bunga kebijakan dan pengetatan likuiditas untuk meredam tekanan inflasi dan ketidakpastian di pasar keuangan, yang berpotensi menahan pemulihan perekonomian global. Kenaikan inflasi global di tengah prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berpotensi memberikan risiko terjadinya stagflasi. Permintaan global terindikasi melemah, tercermin dari penurunan proyeksi *world trade volume* (WTV) yang dapat memengaruhi kinerja ekspor daerah. Tekanan eksternal tersebut mewarnai dinamika perekonomian domestik sepanjang triwulan II 2022. Di tengah berbagai tekanan tersebut, ekspor nonmigas hingga triwulan II 2022 terindikasi tetap kuat, terutama berbasis sumber daya alam (SDA). Hal ini didukung tetap tingginya harga komoditas maupun peningkatan nilai tambah komoditas SDA. Perkembangan tersebut diperkirakan mendukung kinerja lapangan usaha (LU), Industri Pengolahan di Jawa dan Sumatera, serta LU Pertambangan di Sulampua. Sementara itu, dalam menjaga daya beli masyarakat, fiskal dioptimalkan sebagai peredam kenaikan harga minyak global yang ditransmisikan ke harga BBM. Adapun kinerja investasi yang cukup baik, didukung proyek hilirisasi di Sulampua, relokasi industri di Jawa, serta proyek pendukung penyelenggaraan acara internasional di Balinusra.

Optimisme terhadap prospek permintaan domestik mendukung proses perbaikan kinerja LU utama daerah meski dibayangi potensi kenaikan biaya input. Hasil survei resiliensi korporasi di LU Utama mengindikasikan sebagian korporasi terutama di sektor *non-tradable* masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19¹. Hal ini memengaruhi serapan tenaga kerja dan utilisasi dari kapasitas produksi. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap optimis memandang prospek 2022 terutama dari pasar domestik di tengah tantangan permintaan global terutama pada korporasi berorientasi ekspor. Prospek peningkatan permintaan domestik ini tidak terlepas dari relatif terkendalinya kasus COVID-19 di seluruh wilayah dan peningkatan mobilitas sejak akhir triwulan I 2022. Kondisi tersebut diperkirakan mendukung kinerja LU Perdagangan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin). Tetap kuatnya penjualan ritel seiring kenaikan kunjungan ke pusat perbelanjaan dan peningkatan target penjualan kendaraan bermotor menjadi indikator dari prospek kinerja di kedua sektor tersier ini. Kinerja LU Akmamin juga meningkat ditopang oleh kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun domestik pada musim libur sekolah akhir triwulan II 2022 serta penyelenggaraan *event* internasional termasuk G20 di Bali. Prospek peningkatan kinerja permintaan domestik juga direspons dengan aktivitas produksi di LU Industri Pengolahan yang terindikasi dari kenaikan utilisasi kapasitas. Sementara itu, terdapat risiko dari kelangkaan maupun kenaikan harga bahan baku seiring berlanjutnya gangguan rantai suplai. Kenaikan harga energi juga memberikan risiko pada kinerja LU Industri, meski hal ini diperkirakan akan memberikan dorongan bagi percepatan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT). Adapun pemulihan ekonomi daerah juga ditopang investasi melalui PSN yang terus didorong agar memberikan dampak *spillover* ke perekonomian lokal dan sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing ekonomi daerah dalam jangka panjang. Perkembangan tersebut diperkirakan mendukung prospek kinerja LU Konstruksi di semester II 2022 dengan dimulainya sejumlah PSN yang tertunda. Fenomena tetap tingginya harga komoditas juga berpengaruh pada kinerja sektor *tradable* khususnya LU Pertambangan. Produksi batubara diperkirakan meningkat sejalan dengan

¹ Survei Prospek Ketahanan/Resiliensi Pemulihan Sektor Utama dilakukan oleh Bank Indonesia pada korporasi LU Utama di Indonesia pada Juni 2022

permintaan Eropa yang menghadapi krisis energi. Produksi bijih logam dan turunannya juga diproyeksikan meningkat dengan penambahan kapasitas di sisi pengolahan. Di sisi lain, kinerja LU Pertanian diperkirakan lebih terbatas meski terdapat dukungan dari prospek perbaikan produksi tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit. Terbatasnya kinerja LU Pertanian terkait dengan kenaikan harga pupuk di tengah alokasi pupuk subsidi yang terbatas. Meskipun demikian, kondisi cuaca yang lebih kondusif di semester II 2022 diperkirakan mendukung produksi tabama dan hortikultura.

Dengan perkembangan tersebut, kinerja ekonomi di sebagian wilayah untuk keseluruhan 2022 diproyeksikan lebih baik dari prakiraan sebelumnya.

Secara spasial, perbaikan kinerja ekonomi pada 2022 diproyeksikan lebih kuat di Sumatera dan Sulampua dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Dari sisi konsumsi, relatif terbatasnya dampak rambatan kenaikan harga energi dengan dukungan fiskal diperkirakan mampu menjaga daya beli. Sejumlah insentif pendukung pemulihan ekonomi yang masih dipertahankan dan dukungan dari bantuan sosial juga menopang lebih baiknya prospek konsumsi pada 2022. Membaiknya kinerja pariwisata juga turut mendukung kinerja konsumsi yang lebih kuat. Sementara dari investasi bangunan diproyeksikan lebih kuat dengan berlanjutnya PSN maupun proyek swasta yang terindikasi telah membaik. Proyek IKN di Kalimantan juga mendukung investasi bangunan pada 2022. Di sisi lain, kinerja investasi non-bangunan diperkirakan lebih moderat pada 2022, sejalan dengan prospek pelemahan permintaan global. Belanja Pemerintah Daerah 2022 diperkirakan secara bertahap meningkat termasuk dari dukungan program Produk Dalam Negeri (PDN). Dari sisi ekspor, kinerja tetap positif namun lebih terbatas sebagai pengaruh permintaan eksternal yang berpotensi lebih rendah seiring moderasi perekonomian global. Adapun secara sektoral, sumber pemulihan LU utama untuk keseluruhan 2022 relatif berimbang dengan topangan permintaan domestik maupun global. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan masih pada kisaran 4,5-5,3%.

Ke depan, penguatan strategi perekonomian daerah diarahkan untuk mendukung berlanjutnya perbaikan ekonomi didukung penguatan ketahanan LU, optimalisasi belanja daerah, maupun upaya memperkuat ketahanan pangan untuk mendukung stabilitas harga, termasuk penguatan kinerja pariwisata. Ketahanan pelaku usaha dalam menopang pemulihan ekonomi nasional diperkirakan terjaga didukung prospek positif permintaan domestik. Pelaku usaha terus melakukan upaya untuk mendukung prospek tersebut dengan melakukan inovasi produk, meningkatkan penggunaan

teknologi atau digitalisasi, serta meningkatkan belanja modal. Sementara itu, akselerasi belanja APBD untuk mendukung perbaikan ekonomi kedaerahan perlu terus didorong, termasuk optimalisasi kebijakan Program Aksi Afirmasi Pembelian Produk Dalam Negeri (PDN), terutama produk UMKM. Strategi penguatan perekonomian daerah ke depan juga tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi dalam jangka pendek maupun panjang. Hal ini guna mengantisipasi tantangan inflasi baik yang berasal dari global seiring meluasnya kebijakan proteksionisme maupun faktor disparitas produksi dan stok pangan antar waktu maupun antar wilayah. Penguatan aspek ketahanan pangan merupakan hal yang struktural dan krusial untuk menjadi komitmen bersama. Ketiga aspek tersebut dibahas secara khusus pada Bagian II. Selain itu, momentum pelonggaran restriksi perjalanan, baik untuk wisman maupun wisnus yang terus berlanjut telah mendukung pemulihan pariwisata, yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Upaya pemulihan pariwisata juga telah secara konsisten dan berkelanjutan didukung dengan sejumlah kebijakan, diantaranya pembukaan akses wisman dan wisnus serta perluasan sertifikasi CHSE dan penerapan disiplin protokol kesehatan. Salah satu peluang untuk memperkuat pemulihan pariwisata dalam jangka pendek adalah penyelenggaraan *event* dan MICE yang terus meningkat, yang dapat mendorong aktivitas pariwisata. Perubahan tren pariwisata yang mengarah ke *quality tourism*, merupakan peluang yang dapat dioptimalkan dalam jangka menengah sebagai salah satu upaya meningkatkan *length of stay* dan *spending* wisman. Hal ini membutuhkan dukungan sinergi berbagai *stakeholders* dalam penyediaan infrastruktur dan SDM yang memadai serta pengembangan obyek wisata daerah yang sesuai dengan aspek *quality tourism*. Dinamika pemulihan pariwisata dibahas secara khusus pada Bagian III Isu Strategis: "Mendorong Momentum Pemulihan Pariwisata, Mendukung Penguatan Ekonomi Nasional".

Di sisi inflasi, perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan II 2022 di berbagai wilayah tercatat meningkat. Inflasi IHK secara nasional pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 4,35% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy). Capaian inflasi pada triwulan II 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi kelompok inti, *volatile foods* (VF), dan *administered prices* (AP) di seluruh wilayah. Sementara itu, disparitas inflasi secara spasial tercatat melebar, dengan yang tertinggi di Jambi (7,01% yoy) dan terendah di Maluku Utara (2,20% yoy), yang antara lain dipengaruhi oleh masih adanya permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi VF khususnya terkait pola produksi dan kelancaran distribusi. Inflasi kelompok inti meningkat seiring permintaan domestik yang membaik secara gradual di semua wilayah didorong oleh kebijakan pelonggaran

mobilitas, di tengah berlanjutnya transmisi inflasi komoditas global dan perkembangan nilai tukar. Di kelompok VF, peningkatan inflasi terutama disumbang oleh kenaikan harga komoditas hortikultura di seluruh wilayah. Inflasi AP juga meningkat terutama disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara (AU) dan bensin yang di semua wilayah. Pada keseluruhan 2022, inflasi diprakirakan sedikit lebih tinggi dari batas atas kisaran sasaran inflasi, dan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023. Peningkatan inflasi 2022 dipengaruhi beberapa risiko, khususnya dari adanya gangguan sisi *supply* akibat kenaikan harga energi dan pangan global, serta dinamika cuaca yang berisiko mengganggu produktivitas pertanian, di tengah perbaikan permintaan masyarakat. Sejumlah risiko inflasi tersebut

perlu diwaspadai dan diantisipasi. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, sehingga dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi dilakukan secara intensif baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Sejumlah *quick wins* pengendalian inflasi telah ditetapkan, dengan berfokus pada komoditas penyumbang inflasi pangan, yang mencakup penguatan distribusi pangan, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, akselerasi kerjasama antar daerah, serta komunikasi substitusi konsumsi produk pangan olahan.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAGIAN 2

Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perbaikan kinerja ekonomi daerah pada triwulan II 2022 diperkirakan berlanjut ditopang permintaan domestik, di tengah dinamika tekanan eksternal. Mobilitas yang semakin meningkat seiring penurunan kasus COVID-19, diperkirakan memberikan dorongan pada kinerja perekonomian nasional. Kinerja konsumsi maupun investasi diperkirakan terus membaik di tengah prospek ekspor yang tetap positif ditopang tingginya harga komoditas meski lebih terbatas karena tekanan global. Peningkatan permintaan domestik di seluruh wilayah tercermin pada antara lain perbaikan keyakinan konsumen dan penjualan eceran. Di sisi lain, dinamika LU utama di daerah juga dipengaruhi fenomena kenaikan biaya input khususnya dari impor dengan meningkatnya harga energi maupun komoditas pangan. Dengan perkembangan tersebut, prospek LU Industri Pengolahan di Jawa dan Sulampua serta LU Perdagangan di seluruh wilayah diperkirakan tetap baik.

Perbaikan kinerja ekonomi keseluruhan 2022 diproyeksikan lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Prospek kinerja perekonomian domestik didukung terkendalinya kasus COVID-19 serta pelonggaran restriksi mobilitas yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Hasil survei resiliensi korporasi di LU utama juga mengindikasikan optimisme yang ditopang perbaikan pasar domestik. Namun perbaikan kinerja ekonomi daerah 2022 dihadapkan pada sejumlah tantangan. Volume ekspor diperkirakan tertahan akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan meluasnya kebijakan proteksionisme. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha mewaspadaikan risiko kenaikan biaya input sebagai salah satu dampak konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, terdapat sejumlah faktor domestik yang dapat memengaruhi kinerja LU utama seperti LU Pertanian yang menghadapi tekanan kenaikan harga pupuk dan pakan ternak, di tengah terbatasnya alokasi subsidi. Dukungan kebijakan diperlukan dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan meningkatkan resiliensi LU utama. Kontribusi fiskal dalam pembiayaan ekonomi daerah perlu terus didorong termasuk melalui belanja pengadaan produk dalam negeri (PDN). Upaya peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi terus diperkuat yang turut menjadi kunci berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan tetap dalam kisaran 4,5-5,3% didukung perbaikan konsumsi swasta dan belanja fiskal serta ditopang permintaan ekspor.

Kinerja Permintaan

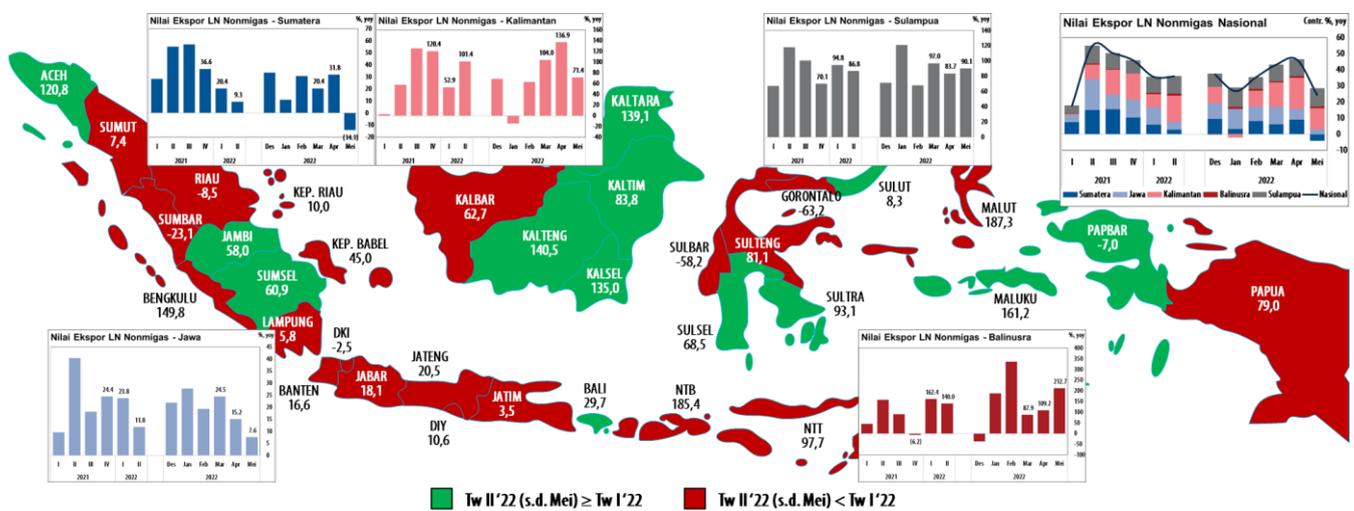
Ekspor Luar Negeri

Kinerja ekspor nonmigas di berbagai daerah pada triwulan II 2022 diperkirakan tetap kuat, meski termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya di tengah dinamika tensi geopolitik global (Gambar II.1). Kinerja ekspor nonmigas ditopang oleh perbaikan ekspor SDA Kalimantan, khususnya komoditas batubara. Ekspor batubara Kalimantan meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan I 2022, di tengah produksi yang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Peningkatan ini didukung pula dengan tingginya harga serta naiknya permintaan Eropa yang sebelumnya merupakan pasar tujuan ekspor Rusia. Peningkatan ekspor batubara lebih lanjut tertahan oleh penurunan ekspor ke Tiongkok akibat pembatasan aktivitas di negara tersebut pada Mei 2022. Sejalan dengan Kalimantan, kinerja ekspor SDA batubara Sumatera turut meningkat. Namun, kinerja ekspor CPO Sumatera diperkirakan berkontraksi seiring dengan pengalihan ekspor temporer pada akhir April 2022 sampai dengan akhir Mei 2022 untuk memenuhi pasokan minyak goreng domestik. Dengan perkembangan tersebut, kinerja ekspor nonmigas Sumatera secara keseluruhan triwulan II 2022 diperkirakan melambat. Perlambatan kinerja ekspor juga terjadi di Balinusra sejalan dengan habisnya kuota ekspor tembaga. Meskipun demikian, kinerja ekspor tembaga Balinusra mulai menunjukkan peningkatan sejak April 2022 didukung oleh optimalisasi kapasitas produksi dan peningkatan kuota ekspor periode April 2022 sampai dengan Maret 2023. Perlambatan juga terjadi pada ekspor manufaktur di wilayah lain. Kinerja ekspor nonmigas Jawa melambat, khususnya produk perhiasan, monitor, serta *furniture*. Perlambatan lebih lanjut tertahan oleh perbaikan ekspor mobil dan motor ke Filipina. Sementara perlambatan kinerja ekspor nonmigas Sulampua terutama berasal dari produk manufaktur besi baja. Perlambatan lebih dalam tertahan oleh peningkatan ekspor produk antara besi baja ke Tiongkok.

Kinerja ekspor nonmigas di sebagian besar daerah pada 2022 diperkirakan tetap tumbuh positif, meski dibawah prakiraan seiring dengan lebih rendahnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Kinerja ekspor daerah diperkirakan tetap kuat seiring implementasi kebijakan dalam negeri untuk mendorong ekspor serta prospek produksi yang masih kuat. Implementasi pelonggaran kebijakan pembatasan ekspor CPO yang disertai dengan

penurunan bea keluar dan pungutan ekspor CPO pada Juni-Juli 2022 pasca larangan ekspor CPO pada awal triwulan II 2022 diharapkan dapat menopang kinerja ekspor Sumatera dan Kalimantan ke depan. Kinerja ekspor di kedua wilayah tersebut turut didukung oleh ekspor batubara yang diperkirakan tetap kuat meskipun sempat tertahan akibat pengalihan ekspor batubara untuk kebutuhan domestik pada awal 2022. Prospek produksi batubara tetap terjaga didukung kondisi cuaca yang membaik pasca meredanya La Nina dan revisi ke atas Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) sejumlah perusahaan batubara. Sementara itu, peluang tambahan ekspor ke pasar Rusia masih terbuka dan dapat terus dimanfaatkan meskipun pangsa relatif rendah, dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Di Balinusra, ekspor konsentrat

tembaga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya seiring dengan peningkatan kuota ekspor dan rencana optimalisasi kapasitas utilisasi pertambangan. Sementara itu, kinerja ekspor berbagai produk manufaktur Jawa seperti TPT, alas kaki, dan otomotif diperkirakan tetap kuat, serta berpotensi untuk mengisi kekosongan pasokan besi baja Rusia. Di Sulampua, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh lebih kuat dari prakiraan sebelumnya didukung oleh penambahan kapasitas smelter nikel di tengah peluang diversifikasi produk Industri, khususnya produk *high-grade nickel* yang sebelumnya disuplai oleh Rusia. Di sisi lain, perbaikan lebih lanjut tertahan oleh terbatasnya permintaan mitra dagang sejalan dengan penurunan prospek ekonomi global di tengah disrupsi pasokan akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

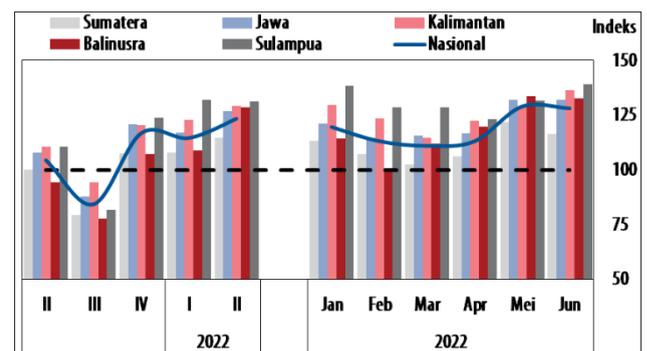


Sumber: Bea Cukai, diolah (data triwulan II 2022 s.d. Mei 2022)

Gambar II.1. Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan II 2022 (%yoy)

Konsumsi Swasta

Pada triwulan II 2022, kinerja konsumsi swasta diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sepanjang triwulan II 2022 penyebaran COVID-19 varian Omicron mereda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mendorong pelonggaran pembatasan mobilitas di tengah. Pelonggaran tersebut diperkirakan menopang aktivitas konsumsi selama HBKN, ditandai oleh naiknya mobilitas di berbagai daerah tujuan mudik terutama di Jawa dan Sumatera. Berbagai perkembangan positif tersebut juga ditandai oleh perbaikan keyakinan konsumen di berbagai wilayah pada triwulan II 2022 (Grafik II.1). Sementara itu, kredit konsumsi (Grafik II.2) terus melanjutkan perbaikan sejak pandemi, terutama didorong oleh perbaikan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), sejalan dengan berbagai kebijakan akomodatif Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong konsumsi dalam mendukung perbaikan ekonomi.

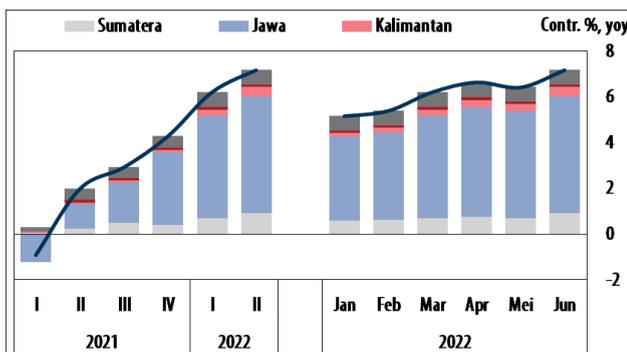


Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.1. Indeks Keyakinan Konsumen

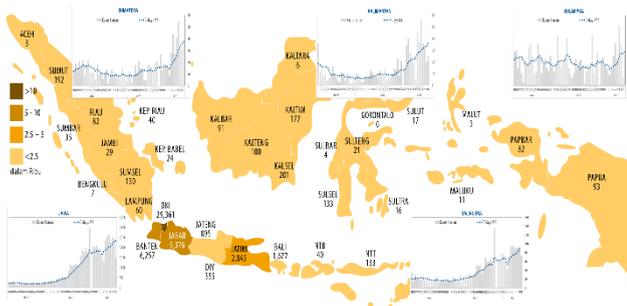
Dengan perkembangan tersebut, kinerja konsumsi swasta pada tahun 2022 diperkirakan melanjutkan perbaikan dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya, di tengah berlanjutnya tensi geopolitik global. Pada awal hingga pertengahan triwulan III 2022, hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia menerapkan PPKM level 1, kecuali 1 (satu) kabupaten/kota di wilayah Sulampua. Perkembangan tersebut turut mendukung mobilitas terkait konsumsi yang tetap tinggi di

berbagai daerah meskipun HBKN telah berlalu. Pendapatan masyarakat juga masih tetap terjaga dengan baik hingga awal triwulan III 2022. Penurunan pendapatan masyarakat kelas bawah di daerah produsen tandan buah segar (TBS) juga telah melandai, seiring pembukaan kembali ekspor CPO yang didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah untuk mendorong kelancaran distribusi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Meskipun demikian, beberapa risiko yang dapat menahan perbaikan konsumsi swasta ke depan perlu menjadi perhatian. Pasca HBKN, penyebaran COVID-19 kembali meningkat hingga awal triwulan III 2022 (Grafik II.3), terutama di berbagai provinsi besar di Jawa. Untuk memitigasi risiko tersebut, akselerasi vaksinasi termasuk *booster* perlu terus didorong terutama di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Selain itu, peningkatan harga-harga sebagai dampak dari peningkatan tensi geopolitik global juga perlu diwaspadai. Untuk itu, Bank Indonesia akan senantiasa menjaga stabilitas makroekonomi nasional agar momentum pemulihan ekonomi dapat tetap berlangsung dengan baik.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.2. Kredit Konsumsi



Sumber: Satgas COVID-19, data per 11 Juli 2022

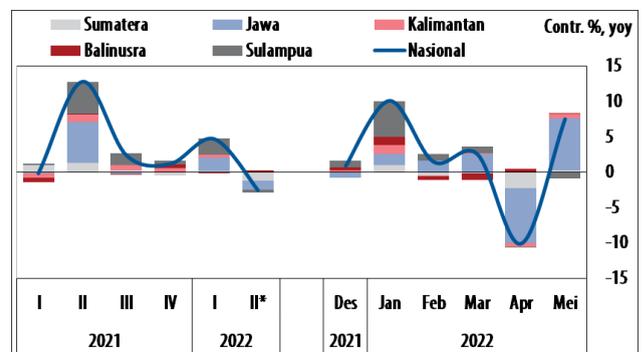
Keterangan: Peta merupakan akumulasi jumlah kasus positif per provinsi 1 bulan terakhir. Grafik merupakan tambahan kasus baru harian per wilayah.

Grafik II.3. Penyebaran Kasus COVID-19

Investasi

Kinerja investasi pada triwulan II 2022 diprakirakan lebih kuat dari prakiraan. Perbaikan kinerja investasi didukung oleh investasi non-bangunan dan investasi bangunan. Impor besi baja oleh korporasi pengolahan smelter nikel di Sulampua tetap tinggi dengan dukungan

penambahan kapasitas produksi. Rencana investasi pada usaha hilirisasi nikel tersebut tercatat jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Di sisi lain, perbaikan kinerja investasi bangunan lebih moderat. Indikator penjualan semen pada triwulan II 2022 menunjukkan perlambatan pertumbuhan, meski meningkat pada Mei 2022. Penjualan semen di hampir seluruh wilayah melambat, relatif sejalan dengan impor barang konstruksi. Hal ini terutama disebabkan oleh penundaan PSN di Jawa dan Balinusra ke semester II 2022. Selain isu pengadaan lahan, penyesuaian anggaran belanja modal dan isu perizinan, terdapat kendala teknis di sejumlah PSN. Sementara di Kalimantan, proyek pembangunan IKN terkonfirmasi baru akan dimulai pada semester II 2022 pasca penyelesaian tender di Agustus 2022. Di sisi lain, selain didorong oleh PSN, prospek investasi bangunan di Sumatera dan Sulampua juga ditopang oleh proyek energi dan usaha pertambangan oleh swasta.



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Grafik II.4. Penjualan Semen Wilayah

Kinerja investasi keseluruhan tahun 2022 diproyeksikan lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Investasi bangunan diprakirakan lebih kuat pada paruh kedua 2022 dengan direalisasinya sebagian PSN yang tertunda di semester I 2022. Upaya percepatan realisasi anggaran belanja modal di semester II 2022 juga terus dilakukan, sejalan dengan indikasi lebih tingginya target kontrak BUMN Karya dari prakiraan sebelumnya. Selain PSN, kontrak BUMN Karya juga didukung oleh proyek pembangunan IKN dan proyek swasta yang tercermin dari *rebound* kredit konstruksi pada triwulan II 2022. Dari sisi investasi non-bangunan, tingginya harga komoditas pertambangan ditengarai menjadi faktor relatif lebih kuatnya resiliensi korporasi yang berdampak pada rencana investasi yang lebih tinggi dibandingkan LU utama lainnya. Survei resiliensi korporasi juga mengindikasikan rencana kenaikan belanja modal terutama di LU Pertambangan. Berlanjutnya hilirisasi pertambangan khususnya di nikel turut menjadi faktor lebih baiknya prospek investasi non-bangunan pada keseluruhan 2022. Rencana penambahan kapasitas produksi hilirisasi nikel tertinggi dicatat di Maluku Utara. Terdapat 50 line smelter pengolahan Feronikel yang akan beroperasi pada 2022 atau meningkat dari 31 line smelter yang telah beroperasi hingga

akhir 2021. Selain penambahan kapasitas, terdapat investasi untuk pengembangan produk olahan nikel dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Investasi pada pertambangan batu bara di Kalimantan, khususnya alat berat, juga diperkirakan masih tinggi dengan semakin meningkatnya permintaan global di tengah krisis energi akibat disrupsi rantai suplai.

Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

Kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda) diprakirakan membaik pada triwulan II 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya di tengah transfer ke daerah yang tertahan. Perbaikan belanja APBD pada triwulan II 2022 dibandingkan triwulan I 2022 terutama bersumber dari realisasi belanja pegawai seiring pencairan tunjangan kinerja dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal triwulan berjalan. Selain itu, kegiatan perjalanan dinas ASN dan program kerja Pemda yang diadakan secara luring terpantau meningkat sejalan dengan kasus COVID-19 yang terus melandai disertai pelonggaran mobilitas, sehingga mendorong komponen belanja barang dan jasa di daerah. Secara spasial, Jawa menjadi wilayah dengan realisasi belanja APBD yang relatif baik. Di sisi lain, pencairan belanja APBD di Sulampua masih relatif tertahan. Optimalisasi belanja Pemda di wilayah ini menjadi semakin penting mengingat konsumsi pemerintah di Sulampua memiliki kontribusi yang lebih tinggi terhadap PDRB tahunan dibandingkan wilayah lainnya sehingga perlu dikelola dengan lebih baik. Selanjutnya, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara agregat tercatat mengalami kontraksi akibat tertahannya DBH (Tabel II.1). DBH tercatat menurun akibat faktor *base effect* dimana pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat penyaluran Kurang Bayar (KB) DBH, sementara penyaluran KB DBH pada 2022 masih menunggu penetapan alokasi setelah diperoleh Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021.

Realisasi belanja APBD tahun 2022 berpotensi membaik meskipun tidak setinggi prakiraan awal, disertai penyaluran TKDD yang meningkat. Prospek perbaikan kinerja belanja Pemda ke depan didorong oleh berbagai upaya percepatan belanja di daerah yang dilakukan secara sinergis bersama K/L terkait, diantaranya percepatan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan belanja modal, peningkatan bimbingan teknis (bimtek), serta penguatan koordinasi antar instansi dalam rangka pembinaan dan pengawasan anggaran. Selain itu, program dukungan pada peningkatan pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil (UMK)/koperasi akan berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas belanja Pemda, khususnya pada pembelian barang dan jasa. Di samping itu, peningkatan alokasi transfer ke daerah, khususnya DBH, akan

meningkatkan pendapatan Pemda sehingga dapat mendorong perbaikan belanja Pemda secara lebih lanjut. Meski demikian, kinerja fiskal di tingkat daerah berpotensi tertahan oleh sejumlah faktor. Masih berjalannya proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu yang cukup lama di seluruh wilayah, belum optimalnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penundaan administrasi terkait keuangan di daerah dapat menahan realisasi belanja Pemda. Selain itu, kendala dalam penerapan dan pemanfaatan aplikasi Katalog Lokal sebagai sarana penerapan program Aksi Afirmasi PDN di tingkat daerah, seperti tantangan dari aspek teknologi, kelembagaan, SDM maupun pelaku usaha, dapat menghambat kelancaran realisasi dan dukungan pada program tersebut. Untuk memitigasi hal tersebut, berbagai langkah telah dan akan terus diupayakan oleh Pemda bersama K/L terkait, yakni penambahan layanan konsultasi, kolaborasi dalam pendampingan *on boarding* bagi pelaku usaha maupun UMK, serta perbaikan fitur pada aplikasi Katalog Lokal. Sementara itu, keterlambatan penyampaian syarat administratif oleh Pemda dan perubahan mekanisme syarat salur dapat menghambat penyaluran TKDD, khususnya pada komponen DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Kendati demikian, upaya berkelanjutan untuk menanggulangi potensi risiko dari sisi pendapatan dan pengeluaran terus ditempuh. Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mendorong percepatan realisasi APBD sehingga mengoptimalkan dampaknya pada pemulihan ekonomi di daerah.

Tabel II.1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD (Triliun Rp)	APBN 2021	APBN 2022	APBN-P 2022	PMK 17/2021	Realisasi		
					% thp pagu s.d. Mei 2021	% thp pagu s.d. Mei 2022	Mei 2022 (yoy)
Transfer ke Daerah	723.5	492.3	736.8	708.5	38.9%	34.9%	-6.7%
I. Dana Perimbangan	688.7	492.1	708.0	674.2	39.8%	35.3%	-6.8%
A. Dana Transfer Umum	492.3	467.3	518.4	479.8	42.7%	39.9%	1.0%
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	102.0	102.0	140.4	102.0	36.2%	15.7%	-40.3%
2. Dana Alokasi Umum	390.3	365.3	378.0	377.8	44.5%	48.9%	10.0%
B. Dana Transfer Khusus	196.4	24.8	189.6	194.4	32.6%	22.7%	-32.0%
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.2	0.0	60.9	63.0	3.5%	3.0%	-16.4%
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	131.2	24.8	128.7	130.8	46.7%	32.0%	-32.5%
II. Dana Insentif Daerah	13.5	0.0	7.0	13.5	10.5%	14.3%	-28.9%
III. Dana Otus dan Keistimewaan	21.3	0.2	21.8	20.8	29.1%	29.1%	4.7%
Dana Desa	72.0	7.2	68.0	72.0	31.0%	39.6%	20.7%
TKDD	795.5	499.5	804.8	780.5	38.2%	35.3%	-4.6%

Sumber: Kemenkeu, diolah

Kinerja Lapangan Usaha

Pertanian

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian pada triwulan II 2022 diprakirakan lebih baik dengan dukungan produksi TBS dan hortikultura. Produksi TBS kelapa sawit diprakirakan membaik dari triwulan sebelumnya sejalan normalisasi produksi pasca musim trek dan peningkatan produktivitas tanaman sawit hasil *replanting* di Sumatera dan Kalimantan. Perbaikan lebih lanjut berisiko tertahan oleh dampak larangan ekspor CPO yang menekan permintaan TBS kelapa sawit dari industri. Selain itu,

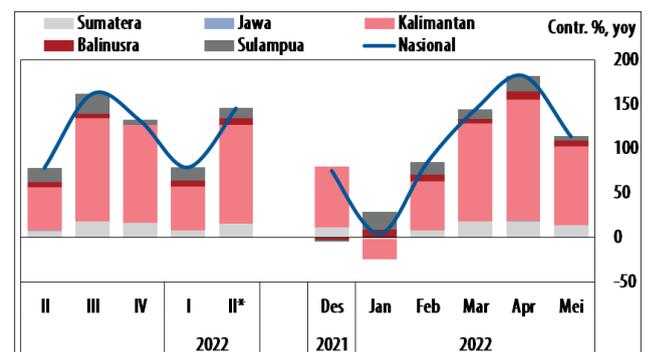
produksi hortikultura juga diperkirakan secara gradual meningkat sejalan dengan masuknya masa panen sebagian komoditas hortikultura seperti aneka cabai di beberapa daerah sentra di Jawa. Kendati demikian, curah hujan yang cukup tinggi dan gangguan hama selama bulan Juni berpotensi menahan capaian produksi di triwulan II 2022. Di sisi lain, produksi padi mengalami perlambatan sesuai pola musiman pasca puncak panen pada triwulan I 2022, namun masih ditopang oleh produksi beberapa daerah sentra di Jawa yang masih dalam masa panen. Produksi perikanan juga diperkirakan melambat pada triwulan II 2022 akibat fenomena La Nina yang lebih panjang sehingga mengganggu aktivitas perikanan tangkap terutama di Sulampua.

LU Pertanian diperkirakan tumbuh lebih baik pada 2022, meski tidak sekuat prakiraan sebelumnya khususnya pada kinerja produksi padi dan perikanan. Prospek produksi padi mengalami revisi ke bawah sebagai pengaruh dari potensi isu di pemupukan dengan kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi pada pertengahan Juli 2022. Kenaikan harga pupuk sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina diperkirakan turut berpengaruh pada upaya peningkatan produksi maupun produktivitas, termasuk program intensifikasi lahan panen pertanian di Jawa. Sementara itu, perbaikan produksi TBS kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan didukung oleh prospek cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun 2021 dan pemulihan permintaan global. Namun demikian, terdapat potensi risiko dari dampak kebijakan ekspor CPO yang menyebabkan termoderasinya penjualan dan pertumbuhan harga TBS kelapa sawit. Di Sumatera, penurunan produksi karet akibat faktor cuaca dan penurunan luas lahan perkebunan turut memengaruhi prospek 2022. Kinerja LU Pertanian di Jawa juga dihadapkan pada tantangan pada produksi dan produktivitas hortikultura dengan curah hujan yang tinggi selama triwulan II 2022 dan potensi kendala pemupukan pada semester II 2022, di tengah semakin kuatnya permintaan masyarakat. Sementara di Balinusra, kinerja LU Pertanian tetap kuat dengan dukungan produksi padi dan jagung, namun diperkirakan lebih rendah dari prakiraan seiring meningkatnya harga pakan ternak dan meluasnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di subLU Peternakan. Prospek LU Pertanian yang lebih terbatas pada 2022 juga bersumber dari aktivitas sub LU Perikanan di Sulampua yang dipengaruhi oleh rencana implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur pada semester II 2022.

Pertambangan

LU Pertambangan diperkirakan tetap tumbuh kuat pada triwulan II 2022, meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Produksi batu bara di berbagai wilayah produsen terindikasi membaik sejalan

dengan pembukaan kembali ekspor batu bara setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Selain itu, permintaan ekspor berbagai komoditas mineral logam seperti tembaga serta nikel dan produk turunannya tetap tinggi didukung harga yang masih kuat, turunnya pasokan global dari Rusia, serta persistensi permintaan Tiongkok di tengah kebijakan *lock down*. Permintaan global yang masih cukup kuat ditandai dari peningkatan pertumbuhan ekspor pertambangan dari berbagai wilayah pada triwulan II 2022 (Grafik II.5). Perlambatan pada triwulan laporan lebih diakibatkan dampak *base effect* lonjakan pertumbuhan LU Pertambangan khususnya subLU Batu Bara dan Lignit pada triwulan II 2021.



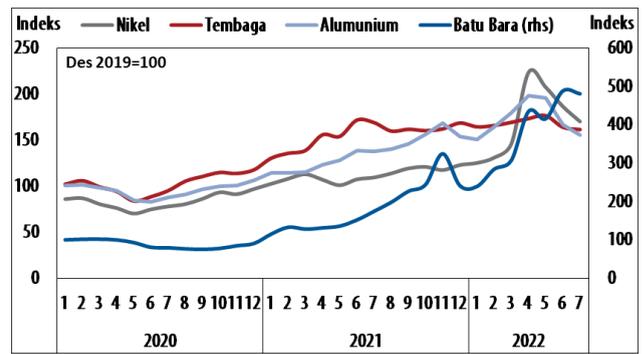
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.5. Nilai Ekspor Pertambangan Nonmigas

Kinerja LU Pertambangan di Kalimantan tumbuh kuat didukung peningkatan produksi batu bara untuk memenuhi permintaan global, dengan tetap memenuhi kebutuhan domestik untuk pembangkit listrik. Ekspor ke Eropa juga meningkat dari wilayah ini, terutama untuk batu bara kalori tinggi yang sebelumnya dipasok oleh Rusia. Curah hujan di Kalimantan juga tetap mendukung perbaikan produksi sepanjang triwulan laporan. Di sisi lain, kinerja produksi batu bara Sumatera diperkirakan sedikit tertahan pada triwulan II 2022 akibat anomali cuaca di wilayah tersebut sehingga produksi sedikit terganggu. Namun, kenaikan produksi timah pasca persetujuan RKAB korporasi produsen serta *lifting* migas yang masih tinggi mendorong LU Pertambangan Sumatera tetap tumbuh kuat. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan Balinusra membaik ditopang peningkatan produksi sejalan dengan perbaikan *recovery rate*, untuk memenuhi peningkatan kuota ekspor baru yang disetujui pada awal triwulan laporan. Adapun produksi tembaga Balinusra pada triwulan II 2022 sepenuhnya dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan ekspor. Di sisi lain, produksi tembaga Sulampua diperkirakan melambat sesuai prakiraan sebelumnya, akibat penambahan kapasitas produksi yang tidak sebesar periode-periode sebelumnya. Namun, produksi nikel diperkirakan tetap kuat terutama untuk memenuhi permintaan smelter yang tengah memasok peningkatan kebutuhan bahan baku industri baja Tiongkok dalam menopang pemulihan pasca *lock down*.

Prospek kinerja LU Pertambangan pada 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina diperkirakan tetap berdampak pada tingginya harga komoditas pertambangan global, tercermin dari harga berbagai komoditas tambang nasional yang masih cukup tinggi meski sedikit termoderasi pada awal triwulan III 2022 (Grafik II.xx). Potensi untuk mengisi pasar Rusia juga masih cukup terbuka, khususnya bagi produsen batu bara dan besi baja. Produksi batu bara Kalimantan dan Sumatera diperkirakan sedikit lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan *fossil fuel* global dan domestik yang diperkirakan tetap kuat untuk menjaga ketahanan energi pada periode pemulihan pasca COVID-19. Permintaan batu bara kalori tinggi dari Eropa ke Kalimantan juga diperkirakan masih akan berlanjut ke depan. Risiko peningkatan pasokan dari Rusia yang memberikan keringanan harga kepada pembeli di tengah tingginya harga batu bara global perlu diwaspadai dalam menjaga kinerja ekspor batu bara ke depan. Selain itu, kebutuhan batu bara dalam negeri juga tetap perlu diutamakan sembari mendorong transisi menuju energi hijau, antara lain melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara yang diharapkan dapat memberikan solusi untuk beberapa kendala pemenuhan DMO batu bara kepada PLN. Kinerja LU Pertambangan Sulampua diperkirakan juga tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, ditopang peningkatan aktivitas penambangan konsentrat nikel untuk memenuhi permintaan smelter yang lebih tinggi. Kebutuhan global terhadap *high grade nickel*, khususnya *nickel matte*, diperkirakan meningkat ke depan dan telah direspon oleh beberapa korporasi hilirisasi nikel dengan penyesuaian jenis produk ekspor. Sementara itu, kinerja penambangan tembaga diperkirakan tetap melambat sesuai dengan prakiraan sebelumnya. Lain halnya dengan Sulampua, pertambangan tembaga Balinusra diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya dan menopang perbaikan kinerja LU Pertambangan secara keseluruhan. Peningkatan kuota ekspor 2022 diperkirakan akan terpenuhi, diimbangi dengan peningkatan *recovery rate* yang lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Prospek positif kinerja LU Pertambangan ke depan terkonfirmasi dari optimisme berbagai korporasi yang memperkirakan kenaikan pertumbuhan penjualan 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendukung prospek positif tersebut, dukungan kebijakan terkait LU Pertambangan baik untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga kecukupan cadangan minerba jangka panjang, serta mendorong transisi menuju ekonomi hijau perlu terus diupayakan dalam menjaga keberlangsungan usaha LU Pertambangan ke depan.



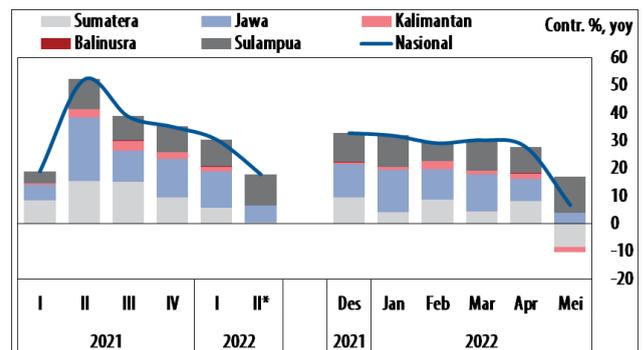
Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik II.6. Harga Acuan Komoditas Pertambangan

Industri Pengolahan

Pada triwulan II 2022 kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat dari triwulan sebelumnya didukung permintaan domestik.

Terjaganya penyebaran kasus COVID-19 di level yang rendah, level PPKM yang terus menurun, serta dukungan kebijakan stimulus Pemerintah menjaga permintaan domestik tetap tinggi. Di sisi lain, permintaan eksternal dari mitra dagang utama melambat seiring perlambatan perekonomian global sehingga menahan pertumbuhan ekspor di berbagai wilayah sampai dengan Mei 2022 (Grafik II.7).



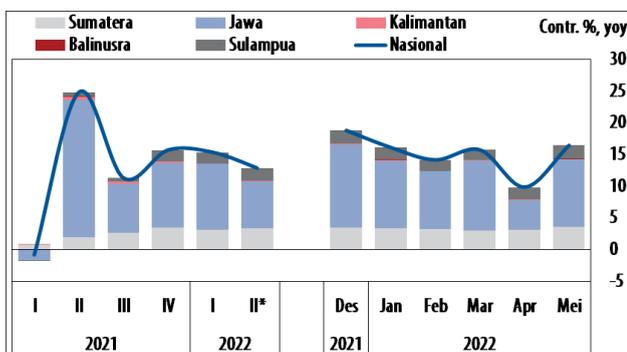
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.7. Ekspor Industri Pengolahan

Prospek LU Industri Pengolahan di berbagai wilayah masih cukup kuat di tengah dinamika tensi geopolitik global dan kebijakan domestik.

LU Industri Pengolahan di Jawa diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan permintaan domestik yang meningkat. Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja industri utama yaitu industri makanan dan minuman. Meningkatnya konsumsi masyarakat sejalan dengan momen HBKN Idul Fitri, didukung pelonggaran restriksi mobilitas dan mudik Lebaran, yang mendorong permintaan produk makanan dan minuman tumbuh lebih kuat dibandingkan triwulan sebelumnya. Periode Lebaran turut menjaga kinerja industri TPT dan alas kaki tetap kuat di tengah menurunnya permintaan global, terutama dari AS. Sementara itu, produksi otomotif diperkirakan tetap tumbuh tinggi seiring dengan permintaan ekspor yang masih terjaga ditopang

perluasan ekspor ke negara tujuan baru dan permintaan domestik yang kuat sebagai dampak dari berlanjutnya insentif PPnBM untuk mobil LCGC, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, potensi kendala pemenuhan input produksi ke depan akibat disrupsi pasokan global perlu mendapat perhatian. Sementara itu, pertumbuhan industri berbasis kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan diprakirakan membaik sejalan dengan permintaan domestik yang tinggi untuk produk pangan dan biodiesel. Perkembangan ini didukung oleh produksi dan ketersediaan bahan baku yang meningkat sejalan dengan faktor cuaca yang kondusif dan berakhirnya musim trek di sebagian besar perkebunan sawit Kalimantan. Di sisi lain, peningkatan kinerja industri CPO yang lebih tinggi tertahan oleh upaya pemenuhan domestik melalui implementasi kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) yang akan berdampak pada melambatnya kinerja ekspor produk CPO dan turunannya pada triwulan II 2022. Perbaikan juga ditopang kinerja industri elektronik di Sumatera seiring dengan meningkatnya permintaan dari Singapura sebagai mitra dagang utama. Kinerja industri alumina di Kalimantan juga membaik didukung peningkatan kapasitas produksi smelter pada triwulan II 2022 di tengah tingginya permintaan dunia. Di Sulampua, kinerja industri berbasis nikel diprakirakan meningkat pada triwulan II 2022 sejalan dengan permintaan Tiongkok yang masih tinggi, percepatan investasi smelter nikel, dan konversi lini produksi *nickel pig iron* menjadi *nickel matte* yang bernilai lebih tinggi.



Sumber: PLN, diolah

Grafik II.8. Konsumsi Listrik Industri Pengolahan

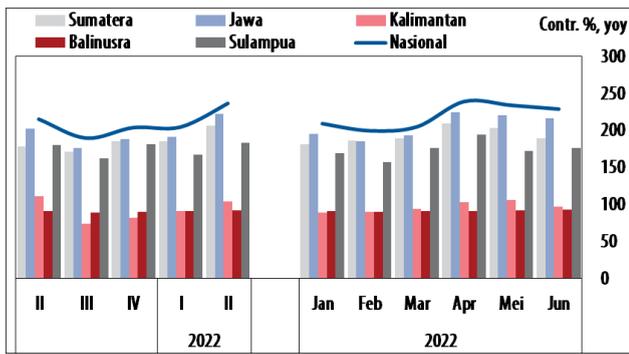
Berlanjutnya permintaan domestik yang kuat diprakirakan mendorong kinerja LU Industri Pengolahan pada 2022 tumbuh lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya, di tengah risiko permintaan eksternal yang termoderasi. Aktivitas produksi berada dalam fase ekspansi untuk memenuhi permintaan domestik tercermin dari peningkatan konsumsi listrik hampir di seluruh wilayah (Grafik II.8). Selain itu prospek penjualan seluruh sub LU Industri Pengolahan diprakirakan membaik dibandingkan 2021 ditopang permintaan domestik, sehingga mendukung perbaikan

utilisasi kapasitas yg belum sepenuhnya pulih ke level pre COVID-19.

Di Jawa, potensi perluasan pasar ekspor dan peningkatan penetrasi pasar di Tiongkok menopang perbaikan kinerja industri TPT di atas prakiraan. Sementara industri mamin dan alas kaki tumbuh kuat seiring dengan perbaikan permintaan domestik yang didukung dengan peningkatan investasi. Di sisi lain, kinerja industri otomotif diprakirakan termoderasi akibat kelangkaan semikonduktor otomotif dan kenaikan harga bahan baku. Di Sulampua, kinerja industri pengolahan tetap kuat seiring dengan bertambahnya kapasitas produksi hilirisasi nikel dan percepatan realisasi penambahan *line* smelter nikel baru. Selain itu, melemahnya kinerja industri hulu produk nikel di Tiongkok memberikan peluang substitusi produk *nickel pig iron* ke negara tersebut. Sementara di Sumatera, kinerja industri berbasis kelapa sawit tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, akibat normalisasi harga serta kebijakan pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik. Namun pelemahan tersebut tertahan oleh tetap kuatnya industri *pulp* dan *paper* seiring dengan perluasan pasar ekspor yang disertai dengan peningkatan investasi dan kapasitas produksi. Sejalan dengan Sumatera, industri berbasis kelapa sawit di Kalimantan juga diprakirakan tidak sekuat prakiraan sebelumnya akibat tertahannya peluang pemenuhan permintaan CPO ke negara mitra. Sementara itu, industri alumina diprakirakan melanjutkan tren positif sejak triwulan I 2022 sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi dan tingginya permintaan eksternal. Ke depan, kinerja industri perlu mempertimbangkan akselerasi transisi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) mengingat terdapat potensi kenaikan biaya bahan baku khususnya energi konvensional.

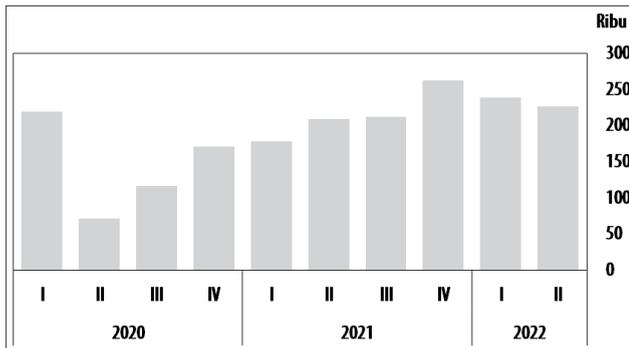
Perdagangan

Sejalan dengan perbaikan konsumsi swasta, kinerja LU Perdagangan diprakirakan membaik pada triwulan II 2022. Penambahan kasus COVID-19 yang mereda, pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas, serta perayaan HBKN diprakirakan mendorong prospek kinerja perbaikan kinerja LU Perdagangan. Perkembangan tersebut ditandai oleh perbaikan indeks riil penjualan eceran terutama pada periode HBKN, dan tetap kuat hingga akhir triwulan II 2022 (Grafik II.9). Kebijakan Pemerintah lainnya diprakirakan turut mendorong kinerja LU Perdagangan, antara lain berlanjutnya relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) *low cost green car* (LCGC) dan *loan to value* (LTV)/*financing to value* (FTV) untuk kendaraan bermotor, tercermin dari penjualan ritel mobil yang tetap tinggi hingga triwulan II 2022 (Grafik II.10). Hal tersebut sejalan dengan peningkatan subindeks pembelian barang tahan lama pada Indeks Keyakinan Konsumen di seluruh wilayah.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.9. Indeks Riil Penjualan Eceran



Sumber: GAIKINDO, diolah

Grafik II.10. Penjualan Mobil - Ritel

Tabel II.2. Mobilitas Terkait Konsumsi

Wilayah	Provinsi	% Agregat Kons. Rf	2021										2022						
			5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
Sumatera	Sumut	4,8	6,6	6,9	0,6	0,1	5,7	11,7	13,6	20,4	19,7	14,9	19,5	22,3	30,7	23,5	30,7		
	Sumsel	3,3	11,8	13,6	8,1	7,4	14,2	18,1	19,2	22,9	21,6	20,6	31,9	36,5	42,7	33,5	44,2		
	Pabu	3,2	7,8	10,4	8,8	4,4	12,5	16,7	19,2	23,0	22,7	22,0	32,5	34,4	38,5	36,3	42,7		
	Lampung	2,5	21,0	16,5	5,1	8,0	15,5	21,2	22,1	24,5	22,5	22,2	39,2	48,1	42,0	42,8	50,1		
	Sumbaw	1,5	28,2	27,8	20,3	18,8	23,9	28,4	32,1	36,1	34,3	34,3	48,7	50,4	78,1	40,1	62,2		
Jawa	Kep. Riau	1,2	-3,8	-6,1	-15,5	-11,4	-4,8	-1,2	0,1	4,3	4,1	1,3	1,2	5,7	6,6	5,1	11,1		
	Jakarta	18,4	-7,1	-8,7	-24,5	-16,7	-8,5	-3,9	-2,1	2,7	1,9	-5,5	-8,1	-7,0	-9,4	-3,5	0,7		
	Jatim	15,7	16,7	12,2	-1,8	4,0	11,9	17,7	16,2	20,5	17,2	16,4	19,1	23,6	35,9	23,4	29,1		
	Jabar	15,5	16,4	10,2	-1,6	6,4	14,5	18,6	18,1	24,0	22,1	19,8	20,5	22,8	30,2	22,8	31,1		
	Jateng	9,2	24,8	13,0	0,2	9,0	17,1	22,2	21,5	26,0	24,1	22,7	31,6	37,0	57,9	34,0	43,6		
Banten	3,9	11,4	8,3	-2,6	4,7	11,9	16,0	17,0	20,6	18,9	15,6	15,0	15,4	15,8	15,9	22,6			
Kalimantan	Kalim	1,3	10,8	10,9	0,7	2,4	10,9	17,0	19,0	23,0	20,3	17,9	21,1	26,8	28,5	26,9	32,8		
	Kalbar	1,2	-1,7	-2,9	-9,3	-4,0	2,1	6,6	6,8	13,5	12,4	11,2	14,7	18,5	23,4	15,8	24,9		
Balinusra	Bali	1,4	24,6	18,1	39,4	28,9	22,5	16,2	14,8	10,3	12,7	15,3	13,6	9,5	4,5	3,4	1,7		
	Sulawesi	3,1	12,0	15,8	9,5	7,8	15,2	20,5	21,0	23,6	22,0	18,1	25,5	22,4	31,5	25,2	37,2		

Keterangan: rata-rata mobilitas retail & recreation, serta grocery & pharmacy.

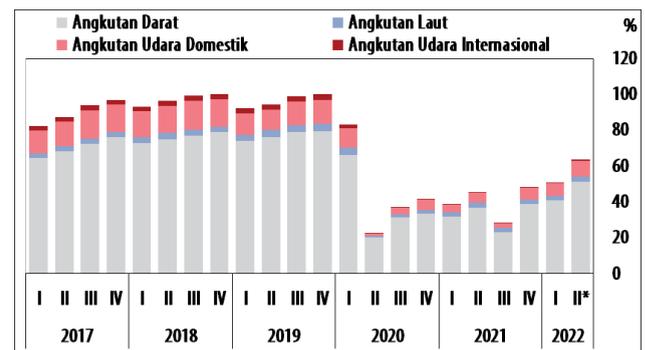
Sumber: Google Mobility Report, data s.d. 9 Juli 2022.

Secara keseluruhan 2022, kinerja LU Perdagangan diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Permintaan domestik diprakirakan menopang pemulihan kinerja LU Perdagangan yang sebagian masih terdampak pandemi COVID-19, di tengah berbagai tekanan permintaan eksternal. Perbaikan mobilitas terkait konsumsi sejak HBKN hingga awal triwulan III 2022 diprakirakan menopang kinerja LU Perdagangan ke depan (Tabel II.2). Di beberapa daerah tujuan wisata, terutama di Balinusra, peningkatan mobilitas wisatawan dalam negeri dan mancanegara yang didorong penyelenggaraan berbagai event berskala nasional dan internasional dapat turut mendukung perbaikan aktivitas perdagangan. Kebijakan Pemerintah juga tetap akomodatif untuk mendukung peningkatan permintaan domestik ke depan. Penerapan PPKM level 1 di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, di mana pusat perbelanjaan dan usaha ritel dapat beroperasi dengan kapasitas 100% dengan protokol

kehatan, diprakirakan juga dapat menopang kinerja perdagangan ke depan. Di sisi lain, risiko penyebaran COVID-19 serta tekanan inflasi dan nilai tukar, di tengah berlanjutnya tensi geopolitik Rusia – Ukraina, perlu dimitigasi untuk mendukung prospek perbaikan kinerja LU Perdagangan ke depan.

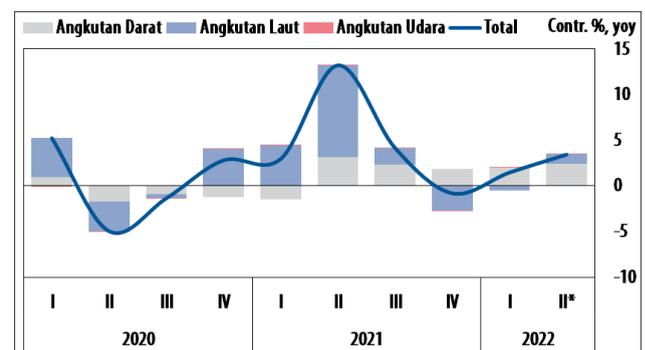
Transportasi dan Pergudangan

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan II 2022 diprakirakan meningkat didukung perbaikan mobilitas dan peningkatan digitalisasi. Kinerja angkutan barang dan penumpang melalui berbagai moda transportasi menunjukkan tren peningkatan didukung perbaikan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat seiring implementasi kebijakan PPKM yang lebih longgar pada triwulan II 2022 (Grafik II.11 dan II.12). Meski aktivitas pemulihan tetap kuat dan terus berlangsung didukung berbagai upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha, terutama meningkatkan penggunaan teknologi/digitalisasi, melakukan inovasi produk, serta meningkatkan belanja modal.



Sumber: BPS

Grafik II.11. Jumlah Penumpang berdasarkan Moda Transportasi



Sumber: BPS

Grafik II.12. Pertumbuhan Transportasi Barang berdasarkan Moda Transportasi

Secara keseluruhan 2022, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Perbaikan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas masyarakat didukung oleh perbaikan aktivitas

ekonomi dan pelaksanaan sejumlah *event* strategis dari sebelumnya *online* menjadi *offline*, di tengah terjanganya kasus COVID-19 dan meningkatnya capaian vaksinasi nasional. Pemerintah juga terus mendukung digitalisasi logistik melalui implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) dan *Indonesia National Single Window* (INSW). Perbaikan lebih lanjut berpotensi tertahan oleh risiko tekanan inflasi harga energi dan pangan global akibat tensi geopolitik global serta kenaikan kasus COVID-19 varian baru. Selain itu, tantangan terkait dengan efisiensi logistik nasional akibat masih terbatasnya pemanfaatan NLE oleh pelaku usaha dapat menahan perbaikan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan lebih lanjut.

Penyediaan Akomodasi & Makanan dan Minuman (Akmamin)

Kinerja LU Akmamin pada triwulan II 2022 diprakirakan membaik dari triwulan sebelumnya, didukung HBKN dan kebijakan pelonggaran restriksi terkait perjalanan.

Peringatan HBKN Idul Fitri yang diiringi oleh kebijakan pemerintah untuk membebaskan mudik setelah dilarang selama dua tahun berturut-turut menopang perbaikan kinerja LU Akmamin di seluruh wilayah pada triwulan II 2022. Di samping itu, libur lebaran yang disertai dengan cuti bersama yang relatif panjang turut mendorong kinerja pariwisata di daerah sehingga semakin menopang perbaikan LU ini selama periode tersebut. Selanjutnya, pelonggaran akses bagi wisatawan mancanegara (wisman), termasuk penghapusan kewajiban karantina dan PCR *test* di seluruh pintu masuk, menopang perbaikan secara lebih lanjut. Aktivitas MICE yang semakin meningkat juga berkontribusi positif pada perbaikan, diantaranya penyelenggaraan Kharisma *Event* Nusantara di 34 provinsi, Moto GP di Mandalika (NTB), serta KTT G20 dan *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GDPPR) di Bali. Perkembangan positif pada LU ini terkonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator yang meningkat secara signifikan sejak awal April 2022, diantaranya tingkat okupansi hotel, mobilitas terkait pariwisata di berbagai provinsi tujuan utama, serta jumlah kunjungan wisman.

LU Akmamin pada 2022 diprakirakan membaik secara signifikan, ditopang aktivitas wisman dan wisnus yang terus meningkat. Pelonggaran restriksi terkait syarat dan ketentuan perjalanan bagi wisnus mendorong permintaan akan wisata yang terindikasi tetap kuat ke depan sehingga mendorong kinerja LU Akmamin untuk keseluruhan 2022. Sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih tinggi, peningkatan penjualan pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya juga dinikmati oleh pelaku usaha yang bergerak pada sektor ini. Lebih lanjut, pelonggaran akses wisman yang lebih luas serta penyelenggaraan *event* internasional akan mengoptimalkan

perbaikan LU Akmamin ke depannya. Meski demikian, *return home policy* yang masih ketat di sejumlah negara asal wisman utama serta tekanan terhadap harga yang semakin meningkat, terutama yang terkait dengan biaya transportasi dan pangan, dapat menahan perbaikan LU Akmamin secara lebih lanjut. Untuk itu, penguatan strategi promosi wisata, termasuk perluasan *Visa on Arrival* (VOA), serta peningkatan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka merespons kenaikan harga perlu dilakukan secara intensif untuk mendukung dan mendorong momentum perbaikan pada LU Akmamin.

Konstruksi

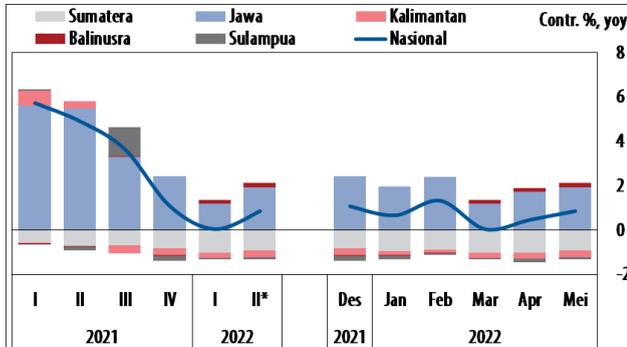
Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2022 diprakirakan meningkat di semua wilayah didorong pembangunan proyek pemerintah maupun swasta. Perkembangan ini

terindikasi dari kredit konstruksi yang mengalami *rebound* dari triwulan I 2022 sejalan dengan berlanjutnya realisasi proyek pembangunan di berbagai daerah. Peningkatan pertumbuhan kredit konstruksi terutama di Jawa dan Balinusra. Hal ini ditengarai terkait dengan meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, diantaranya proyek fasilitas industri maupun logistik-pergudangan serta *data center*. Sementara itu, *progress* proyek konstruksi swasta berskala besar tercatat dari pembangunan smelter tembaga PT Freeport (Jawa Timur), pabrik *electric vehicle* (Jawa Barat), dan Tangguh LNG Train (Papua Barat). Di sisi PSN, *progress* pembangunan ruas jalan tol dan bendungan di Sumatera dan Balinusra, MRT Jakarta Fase 2 di Jawa, serta Pelabuhan Likupang di Sulampua terindikasi meningkat pada triwulan II 2022 dan diprakirakan berlanjut hingga triwulan III 2022. Kendati demikian, penundaan target penyelesaian beberapa proyek PSN karena kendala teknis seperti Bendungan Sepaku Semoi, LRT Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyebabkan perbaikan LU Konstruksi di bawah prakiraan sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan realisasi fisik infrastruktur jalan dan sumber daya air yang lebih rendah dari tahun 2021 untuk periode yang sama.

Secara keseluruhan 2022, LU Konstruksi diprakirakan lebih tinggi dari asumsi sebelumnya dengan dorongan dari sejumlah proyek swasta maupun Non-PSN di Sumatera, serta pembangunan IKN di Kalimantan. Di

Sumatera, perbaikan LU Konstruksi didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah daerah di luar PSN yang lebih tinggi dari prakiraan, serta indikasi meningkatnya pembangunan rumah pribadi dan bangunan komersial. Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor properti hingga September 2022 berpotensi menjaga momentum pembangunan properti hunian. Di samping itu, perbaikan kinerja LU Konstruksi juga didorong oleh dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan pada Agustus 2022, di tengah *shifting*

pembangunan sejumlah PSN khususnya di Jawa dari semester I 2022 ke semester II 2022. Meski demikian, perbaikan LU Konstruksi masih dihadapkan pada masalah pengadaan lahan, perijinan, dan peningkatan biaya. Hasil survei resiliensi mengindikasikan masih terbatasnya rencana peningkatan belanja modal pelaku usaha konstruksi dibanding tahun 2021.



Sumber: Kemenperin

Grafik II.13. Pertumbuhan Kredit LU Konstruksi

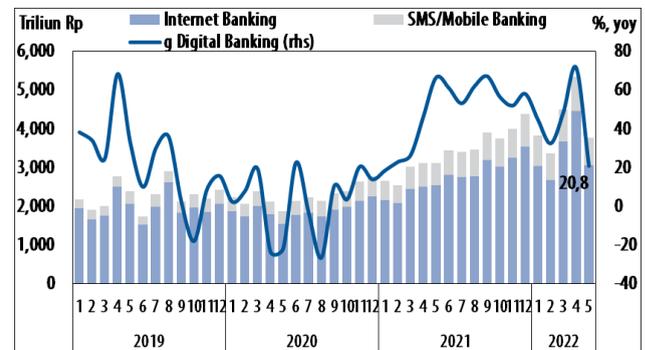
Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh kuat di triwulan II 2022 didorong implementasi pembayaran digital yang semakin luas (Grafik II.14).

Tetap tingginya preferensi masyarakat untuk berbelanja secara daring sejalan dengan penyesuaian ke pola hidup *new normal* turut menjadi faktor pendukung. Nilai transaksi melalui Uang Elektronik (UE) pada triwulan II 2022 mengalami peningkatan hingga sebesar 39,8% (yoy). Namun, pertumbuhan nilai transaksi keuangan digital melambat di Mei 2022 setelah tumbuh sangat tinggi pada April 2022. Transaksi *digital banking* secara triwulanan tercatat tumbuh 38,4% (yoy) pada triwulan II 2022. Sementara itu, nilai transaksi melalui Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM/Debit, tumbuh 16,8% (yoy). Adapun transaksi ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2022 secara nominal tercatat tumbuh 4,7% (yoy). Sementara itu, rata-rata harian nominal transaksi nilai besar melalui Sistem BI *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh 27,36% (yoy).

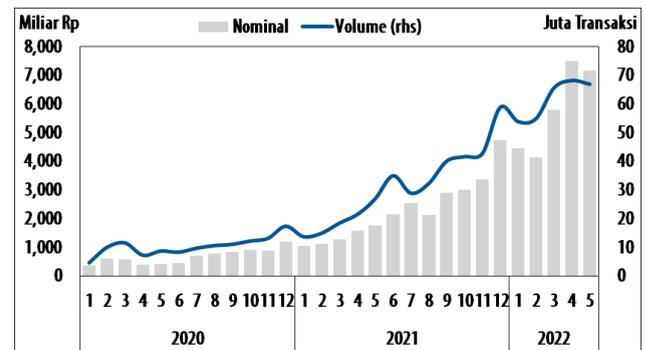
Bank Indonesia terus mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk dalam rangka mendukung program pemerintah dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta mendorong akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) yang inklusif dan efisien melalui kebijakan sistem pembayaran nontunai. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia terus melanjutkan upaya perluasan layanan BI-FAST melalui *mobile banking* serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat dan lembaga

terkait. Selain itu, guna memperkuat ekosistem dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, akselerasi peningkatan transaksi dan perluasan *merchant* QRIS juga terus didorong. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS secara nominal maupun volume sampai dengan triwulan II 2022 (Grafik II.15) dengan total volume sebesar 66,9 Juta Transaksi dan Nominal sebesar Rp 7,1 T pada Mei 2022.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.14. Transaksi Digital Banking



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.15. Transaksi QRIS

Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) hingga triwulan II 2022 meningkat 9,3% (yoy). Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, serta mengoptimalkan digitalisasi layanan kas keliling (aplikasi PINTAR) dan kerja sama dengan lembaga terkait dalam distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil).

Inflasi Daerah

Perkembangan inflasi IHK pada triwulan II 2022 di berbagai wilayah tercatat meningkat. Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 4,35% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,64% (yoy). Peningkatan inflasi terjadi di semua wilayah dengan capaian inflasi tertinggi tercatat di wilayah Sumatera dan Balinusra masing-masing sebesar 5,82% (yoy) dan 5,39% (yoy). Sementara itu, realisasi inflasi wilayah Jawa tercatat yang terendah yakni 3,93% (yoy) atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0\%$. Capaian inflasi pada triwulan II 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi

kelompok inti, VF, dan AP di seluruh wilayah. Di sisi lain, disparitas inflasi secara spasial tercatat melebar, dengan yang tertinggi di Jambi (7,01% yoy) dan terendah di Maluku Utara (2,20% yoy), yang antara lain dipengaruhi oleh masih adanya permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi VF khususnya terkait pola produksi dan kelancaran distribusi.

Inflasi kelompok inti meningkat seiring permintaan domestik yang membaik secara gradual di semua wilayah didorong oleh kebijakan pelonggaran mobilitas, di tengah berlanjutnya transmisi inflasi komoditas global dan nilai tukar yang cenderung depresiatif. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan inflasi inti terutama disumbang oleh kenaikan harga sewa rumah, khususnya di Sumatera dan Jawa, sejalan dengan mulai diberlakukannya kebijakan *work from office* (WFO) dan Pertemuan Tatap Muka (PTM) untuk sekolah dan perkuliahan. Kenaikan harga komoditas sabun detergen bubuk/cair dan mobil juga turut mendorong peningkatan inflasi inti di semua wilayah seiring harga CPO yang masih tinggi dan berakhirnya diskon PPNBM mobil. Selain itu, harga komoditas nasi dengan lauk di semua wilayah meningkat sejalan dengan kenaikan harga bahan pangan. Tekanan inflasi inti yang lebih tinggi tertahan oleh moderasi harga emas perhiasan seiring perkembangan harga emas global antara lain sebagai dampak dari pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara.

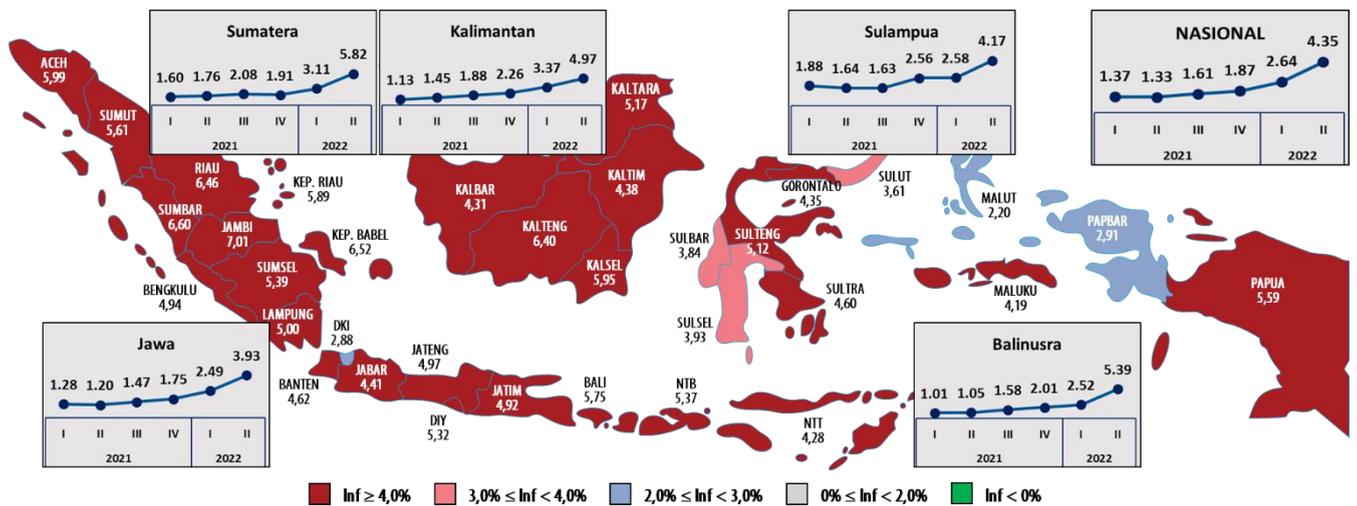
Inflasi VF secara nasional lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi VF yang merata di semua wilayah. Berdasarkan komoditasnya, inflasi VF yang lebih tinggi tersebut terutama disumbang oleh kenaikan harga komoditas hortikultura yang terjadi di semua wilayah. Kenaikan harga komoditas hortikultura, khususnya aneka cabai dan bawang merah, diakibatkan oleh kondisi cuaca yang tidak kondusif bagi produksi, sehingga mendorong kenaikan harga baik di wilayah sentra maupun nonsentra. Selain itu, harga minyak goreng juga mengalami peningkatan pada triwulan laporan pasca pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dan penetapan HET migor curah sebesar Rp14.000/liter, di tengah masih tingginya harga CPO global. Lebih lanjut, kenaikan harga input produksi dan menurunnya insentif peternak untuk chick-in karena harga telur di tingkat produsen yang rendah di awal tahun dan kenaikan harga bibit mendorong peningkatan harga telur ayam ras di

semua wilayah. Tekanan inflasi VF yang lebih tinggi tertahan antara lain oleh moderasi inflasi daging sapi khususnya di Sumatera, Jawa dan Balinusra yang disebabkan oleh penurunan permintaan akibat kekhawatiran konsumen terhadap wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Inflasi kelompok AP juga meningkat di semua wilayah. Peningkatan tersebut terutama disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara (AU) dan bensin yang merata di semua wilayah. Kenaikan tarif AU dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pasca kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat dan HBKN Idulfitri, di tengah terbatasnya armada maskapai, kenaikan PPN, serta adanya kebijakan pengenaan fuel surcharge oleh maskapai seiring kenaikan harga avtur. Adapun kenaikan inflasi komoditas bensin didorong oleh kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina pada 1 April 2022. Sementara itu, meningkatnya tekanan inflasi AP juga bersumber dari kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, baik dari LPG nonsubsidi dan subsidi di tingkat pengecer saat HBKN Idulfitri, serta bersumber dari komoditas aneka rokok seiring berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau oleh produsen.

Ke depan, inflasi tahun 2022 di seluruh wilayah diprakirakan sedikit lebih tinggi dari batas atas kisaran sasaran. Secara umum, proyeksi tersebut disebabkan oleh adanya gangguan sisi supply akibat kenaikan harga energi dan pangan global, serta dinamika cuaca yang berisiko mengganggu produktivitas pertanian, di tengah perbaikan permintaan masyarakat. Dalam upaya mengendalikan tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, sehingga dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi tersebut dilakukan secara intensif baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Sejumlah quick wins pengendalian inflasi telah ditetapkan, dengan berfokus pada komoditas penyumbang inflasi pangan, yang mencakup penguatan distribusi pangan, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, akselerasi kerjasama antar daerah, serta komunikasi substitusi konsumsi produk pangan olahan. Selain itu, penguatan implementasi strategi pengendalian inflasi 4K² terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan ke depan.

² Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.2. Peta Inflasi Daerah Triwulan II 2022 (%yoy)

Ketahanan Pelaku Usaha dalam Menopang Pemulihan Ekonomi Nasional

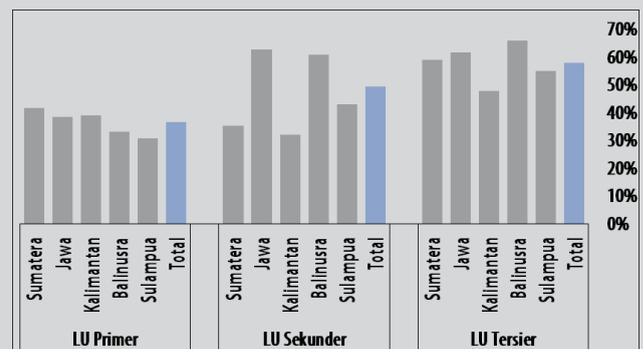
Pemulihan ekonomi global dan nasional masih terus berlangsung di tengah dinamika COVID-19 dan tensi geopolitik global. Tekanan permintaan global dan domestik disertai pembatasan aktivitas usaha selama pandemi memengaruhi kinerja pelaku usaha. Kondisi tersebut mengakibatkan pemulihan berlangsung secara gradual pada tahun 2021 dan 2022. Proses pemulihan tersebut juga dihadapkan pada berbagai tekanan terutama konflik Rusia-Ukraina serta divergensi kebijakan makroekonomi berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, Bank Indonesia melakukan pendalaman terhadap kondisi pelaku usaha didukung survei di berbagai wilayah untuk mengetahui gambaran ketahanan pelaku usaha dalam menghadapi tekanan stabilitas makroekonomi serta prospek pemulihan ekonomi ke depan.³

Pada 2022, pelaku usaha masih merasakan dampak COVID-19 terhadap kinerja korporasi (Grafik II.16).

Persistensi dampak COVID-19 terhadap kinerja usaha terutama dirasakan oleh pelaku usaha di LU Tersier, khususnya LU Akmamin di Balinusra. Tekanan tersebut juga mengakibatkan perbaikan serapan tenaga kerja LU Tersier di berbagai wilayah relatif tertahan. Pada LU Sekunder, dampak COVID-19 terutama masih dirasakan oleh pelaku usaha di Jawa dan Balinusra yang turut memasok kebutuhan LU Tersier di berbagai daerah, khususnya LU Perdagangan dan Akmamin. Sementara itu, hanya 37% pelaku usaha LU Primer yang masih merasakan dampak COVID-19. Hal tersebut sejalan dengan tingkat pertumbuhan LU Primer selama pandemi yang masih cukup tinggi dibandingkan LU Sekunder dan Tersier. Sementara itu, ruang peningkatan utilisasi produksi seluruh LU di seluruh wilayah juga masih terbuka seiring proses pemulihan yang masih berlangsung secara gradual.

Di tengah peningkatan tekanan permintaan global, permintaan domestik diperkirakan semakin kuat dan dapat menopang kinerja pelaku usaha ke sepanjang

2022. Prospek positif permintaan domestik seiring situasi COVID-19 yang lebih terkendali direspons oleh pelaku usaha dengan mempertahankan dan/atau meningkatkan pangsa pasar domestiknya (Grafik II.17). Secara agregat, 59% pelaku usaha akan mempertahankan pangsa pasar domestiknya, sementara 35% menyatakan pangsa pasar domestik 2022 lebih tinggi daripada 2021. Peningkatan pangsa pasar domestik terutama dilakukan oleh pelaku usaha di Jawa dan Balinusra. Untuk menopang prospek perbaikan permintaan ke depan, pelaku usaha terutama akan melakukan inovasi produk, meningkatkan penggunaan teknologi atau digitalisasi, serta meningkatkan belanja modal (Grafik II.18).



Sumber: Survei Resiliensi Korporasi LU Utama (Juni 2022), Bank Indonesia

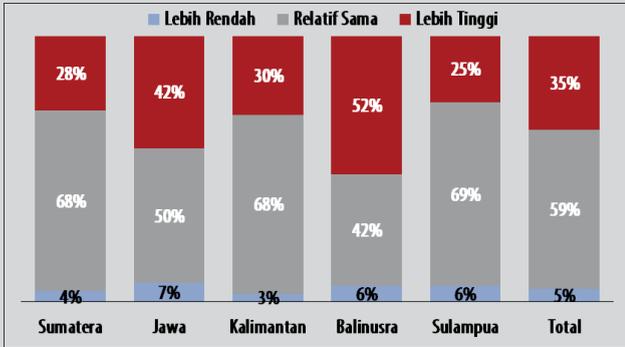
Keterangan: LU Primer: Pertanian dan Pertambangan; LU Sekunder: Industri Pengolahan dan Konstruksi; Tersier: Perdagangan, Akmamin, dan jasa-jasa lainnya. Pangsa terhadap jumlah responden pada LU dan Wilayah masing-masing.

Grafik II.16. Persistensi Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha

Salah satu potensi risiko yang perlu diantisipasi terhadap kinerja pemulihan ke depan adalah dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Dampak tekanan tersebut terutama dirasakan oleh sebagian pelaku usaha responden survei di LU Sekunder (Grafik II.19). Penurunan pasokan dari Rusia dan Ukraina terhadap pasar global berdampak pada kenaikan harga komoditas global. Di satu sisi, kenaikan harga komoditas bersifat akomodatif terhadap kinerja ekspor nasional yang masih didominasi oleh sumber daya

³ Berdasarkan pasal 14 UU no. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 6 tahun 2009, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dengan tetap merahasiakan sumber dan data individual.

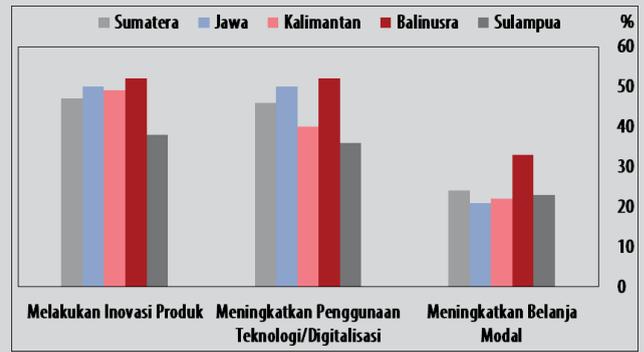
alam. Di sisi lain, turunnya pasokan komoditas energi dan bahan baku industri dari kedua negara berpotensi berdampak pada kenaikan biaya produksi berbagai LU di dalam negeri yang berpotensi meningkatkan tekanan harga sepanjang 2022. Bank Indonesia akan terus mewaspadai tekanan inflasi ke depan dan dampaknya pada ekspektasi inflasi serta menempuh sejumlah kebijakan apabila terdapat tanda-tanda kenaikan inflasi inti.



Sumber: Survei Resiliensi Korporasi LU Utama (Juni 2022), Bank Indonesia.

Keterangan: Pangsa terhadap jumlah responden pada wilayah masing-masing.

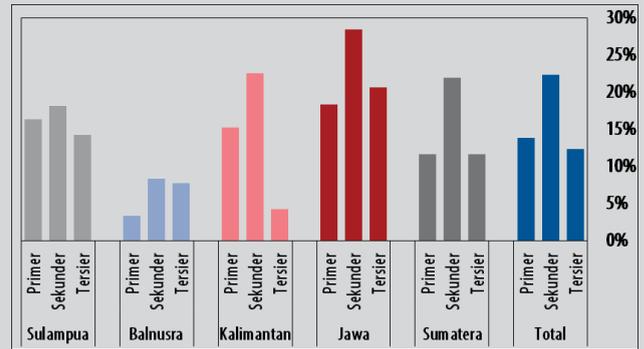
Grafik II.17. Pangsa Pasar Domestik 2022 dibandingkan 2021



Sumber: Survei Resiliensi Korporasi LU Utama (Juni 2022), Bank Indonesia.

Keterangan: jawaban responden dapat lebih dari 1.

Grafik II.18. Tiga Upaya Utama untuk Mendorong Pemulihan Kinerja Usaha ke Depan



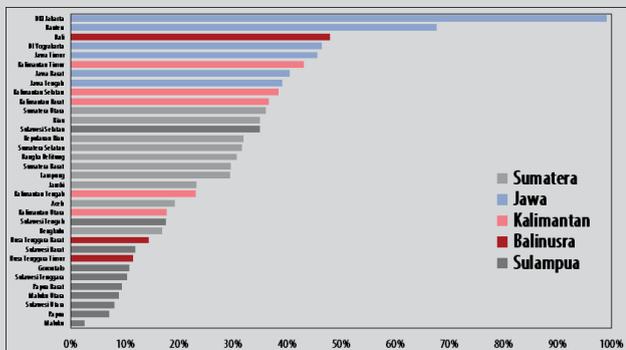
Sumber: Survei Resiliensi Korporasi LU Utama (Juni 2022), Bank Indonesia

Keterangan: LU Primer: Pertanian dan Pertambangan; LU Sekunder: Industri Pengolahan dan Konstruksi; Tersier: Perdagangan, Akamin, dan jasa-jasa lainnya. Pangsa terhadap jumlah responden pada LU dan Wilayah masing-masing.

Grafik II.19. Pelaku Usaha Terdampak Konflik Rusia-Ukraina

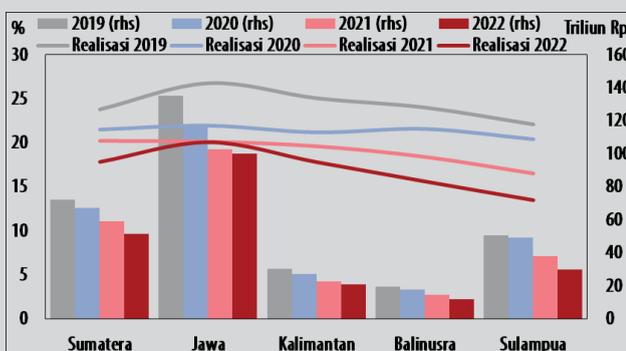
Optimalisasi Peran Fiskal Daerah untuk Mendukung Perbaikan Ekonomi dan Stabilitas Harga

Kemandirian fiskal daerah masih relatif terbatas, tercermin dari pendapatan sebagian besar wilayah yang masih ditopang oleh TKDD, terutama di wilayah Sulampua dan Sumatera. Rata-rata rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi belanja daerah di seluruh provinsi sampai dengan Mei 2022 hanya mencapai 28,7% dengan dua provinsi yang memiliki kapasitas rasio PAD terhadap belanja daerah di atas 50%, yaitu DKI Jakarta dan Banten (Grafik II.20).



Sumber: DJPK diolah, data sementara s.d. 30 Mei 2022
Grafik II.20. Rasio PAD terhadap Belanja Daerah

Di sisi lain, realisasi belanja APBD sampai dengan Mei 2022 secara agregat lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu, seluruh wilayah mencatat persentase belanja terhadap pagu anggaran yang lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (Grafik II.21). Sejalan dengan kinerja belanja APBD yang belum optimal tersebut, dana Pemda seluruh wilayah di perbankan pada akhir Mei 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

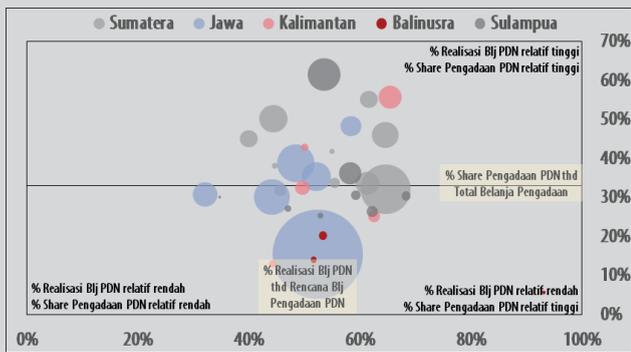


Sumber: DJPK diolah, data sementara s.d. 30 Mei 2022
Grafik II.21. Perkembangan Realisasi Belanja Wilayah

Optimalisasi belanja APBD untuk mendorong perbaikan ekonomi kedaerahan dapat didukung melalui Program

Aksi Afirmasi Pembelian Produk Dalam Negeri (PDN), terutama produk UMKM. Dengan alokasi target pembelian PDN di dalam APBD mencapai Rp200 triliun, optimalisasi kebijakan tersebut diyakini mampu mendorong aktivitas perekonomian lokal. Prospek keberhasilan kebijakan ini juga didukung oleh perkembangan persiapan teknis yang telah dilakukan pemerintah bersama K/L terkait. Dalam hal ini, sejumlah Pemda telah menyediakan Katalog Lokal, yaitu media digital untuk melakukan jual beli PDN antara Pemda dengan penyedia produk. Per Juni 2022, telah terdapat 123 Katalog Lokal di 542 daerah, meningkat dari 99 daerah pada Maret 2022. Sejalan dengan perkembangan tersebut, jumlah produk yang sudah ditayangkan pada Katalog Lokal juga telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari sekitar 15,5 ribu pada Maret 2022 menjadi 34,7 ribu pada Juni 2022. Sementara itu, peningkatan alokasi TKDD 2022 berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 104 Tahun 201 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, khususnya pada komponen DBH, akan mendorong perbaikan pendapatan Pemda sehingga diharapkan dapat berperan dalam perbaikan kualitas belanja di daerah, termasuk dukungannya pada program pembelian PDN ini.

Akselerasi belanja Pemda dan optimalisasi realisasi program aksi afirmasi dukungan pada PDN dan UMKM/koperasi perlu terus didorong. Perkembangan belanja APBD di seluruh wilayah yang berada dalam tren perlambatan, khususnya di wilayah Sulampua dan Balinusra, berpotensi menahan perbaikan ekonomi lebih lanjut. Kontribusi konsumsi Pemda terhadap PDRB di kedua wilayah tersebut memiliki peranan yang signifikan, masing-masing mencapai 14,2% dan 16,1%, lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya yang berkisar antara 7,6% sampai dengan 8,8%. Oleh karena itu, upaya-upaya percepatan belanja Pemda, termasuk mengoptimalkan dana Pemda di perbankan, perlu segera dilakukan. Sementara itu, program aksi afirmasi PDN dan pemanfaatan Katalog Lokal terindikasi belum optimal tercermin dari masih banyaknya provinsi dengan realisasi belanja PDN yang masih rendah dibandingkan dengan targetnya (Grafik II.22).



Sumber: LKPP, data per 20 Juni 2022

Grafik II.22. Perkembangan Kinerja Belanja PPN di Tingkat Provinsi

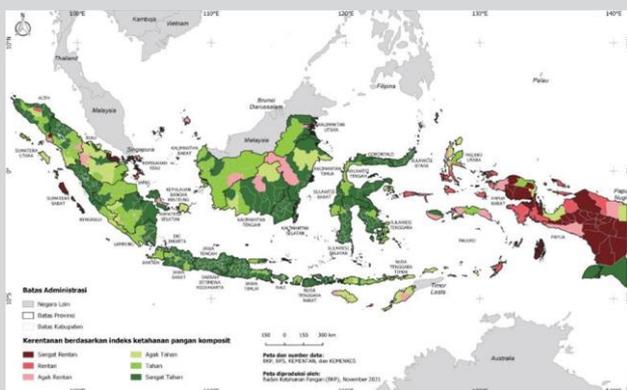
Selain itu, seluruh provinsi perlu memenuhi target minimal transaksi pembelian dari UMKM atau koperasi sebesar 40%.

Ke depan, percepatan penyediaan Katalog Lokal serta pemanfaatannya perlu ditingkatkan, termasuk menambah jenis produk dan jumlah penyedia produk. Dari segi APBD, kendala dalam penyaluran TKDD dan belanja Pemda harus terus ditanggulangi dengan berbagai langkah, antara lain melalui penguatan koordinasi antar instansi serta perbaikan kepatuhan dan ketepatan dalam administrasi. Selain itu, di tengah penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang masih berlangsung, peningkatan sosialisasi terkait kebijakan pajak dan retribusi daerah yang baru perlu digencarkan agar proses transisi ke depan dapat berjalan dengan lancar sehingga pendapatan Pemda tetap terjaga saat aturan tersebut mulai diimplementasikan pada 2023.

Ketahanan Pangan Mendukung Stabilitas Harga dan Berlanjutnya Pemulihan Ekonomi

Penguatan ketahanan pangan Indonesia perlu menjadi prioritas dalam mendukung stabilitas harga dan berlanjutnya pemulihan ekonomi. Ketahanan pangan yang kuat akan mendukung terjaganya stabilitas harga dan ekspektasi inflasi yang turut berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Hal ini sangat krusial dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi, di tengah tekanan eksternal terhadap harga input pertanian khususnya di pupuk dan pakan ternak serta kebijakan proteksionisme pangan di global.

Peringkat Indonesia di *Global Food Security Index (GFSI)* turun pada periode pandemi COVID-19. Dari 113 negara, Indonesia digolongkan sebagai negara dengan “*moderate performance*” dalam hal ketahanan pangan pada 2021. Sejumlah tantangan mewarnai kondisi ketahanan pangan nasional baik dari aspek ketersediaan, keterjangkauan (akses), pemanfaatan. Dari sisi ketersediaan, selain faktor produksi, terdapat isu yang lebih struktural terkait produktivitas. Hal ini disebabkan oleh terutama semakin meningkatnya lahan pertanian jenuh akibat dari intensitas pemupukan dalam waktu yang panjang.⁴ Regenerasi SDM pertanian yang belum optimal guna meningkatkan optimalisasi teknologi juga menjadi salah satu faktor penurunan produktivitas. Sementara konversi lahan pertanian secara konsisten dari waktu ke waktu untuk pembangunan kawasan perumahan, industri, maupun perkebunan menjadi isu struktural khususnya di Jawa.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2021

Grafik II.23. Peta Ketahanan Pangan Spasial

Dalam merespons berbagai tantangan ketahanan pangan di atas, telah dirumuskan kerangka besar

kebijakan ketahanan pangan Indonesia. Pada aspek ketersediaan, upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan menjadi prioritas, di tengah tekanan eksternal terhadap harga input LU Pertanian khususnya pupuk dan pakan ternak. Adapun hal penting yang menjadi fokus adalah penguatan data pertanian baik data produksi maupun stok. Neraca pangan yang akurat tidak hanya mengindikasikan pemetaan surplus – defisit, namun juga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih strategis seperti Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan ekspor-impor. Hal ini diharapkan dapat mengatasi disparitas produksi dan stok antar waktu dan antar wilayah. Dukungan dan sinergi berbagai *stakeholders* sangat dibutuhkan dalam kerangka implementasi KAD.



Sumber: BKP Kementerian Pertanian, 2021

Grafik II.24. Pilar Ketahanan Pangan

Terkait dengan aspek keterjangkauan, efisiensi dalam logistik pangan menjadi kunci. Sistem logistik pangan secara modern dan terpadu merupakan keniscayaan. Karakteristik sejumlah bahan pangan yang mudah rusak membutuhkan manajemen logistik dan distribusi yang efisien. Selain itu, kelancaran akses terhadap bahan pangan maupun informasi yang transparan dan kredibel perlu dipastikan. Dalam perspektif yang lebih pendek, gejolak harga pangan perlu mendapat perhatian khusus. Program stabilisasi pasokan dan harga secara terukur dibutuhkan guna memastikan terjaganya ekuilibrium *supply-demand*.

Sejumlah upaya jangka pendek dan menengah-panjang perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan.

⁴ Publikasi Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, 2021.

Dalam jangka pendek, KAD antar wilayah yang mengalami surplus dan defisit didukung monitoring dan mekanisme terkoordinasi perlu diperkuat. Sementara dalam jangka menengah-panjang, pengembangan *food estate* menjadi salah satu program unggulan ketahanan pangan. Hal ini diharapkan dapat secara efektif mengurangi disparitas yang kerap menjadi penyebab inflasi *volatile foods* khususnya di wilayah timur Indonesia. *Food estate* diarahkan untuk memperkuat aspek kelembagaan (korporatisasi) pertanian dengan dukungan teknologi pertanian modern termasuk mekanisasi serta sumber daya yang memadai baik SDM maupun kapital.

BAGIAN 3

Isu Strategis: Memperkuat Momentum Pemulihan Pariwisata, Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Setelah menghadapi tekanan pandemi yang cukup berat selama dua tahun terakhir, melandainya kasus Covid-19 sejak awal tahun memberikan optimisme bagi pemulihan aktivitas pariwisata. Berbagai negara telah menerapkan pelonggaran restriksi pergerakan mobilitas secara bertahap, baik domestik maupun antar negara. Meski pergerakan mobilitas sempat sedikit tertahan akibat gelombang varian omicron, *travel demand* global tetap berada dalam tren yang menguat. Perkembangan positif ini juga ditandai mengemukanya perubahan preferensi berwisata secara global sebagai dampak proses adaptasi terhadap pandemi Covid-19.

Momentum pemulihan pariwisata ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemulihan yang terus ditempuh. Secara umum, tiga langkah strategis yang telah dan akan terus menopang pemulihan aktivitas pariwisata ke depan, yakni, *pertama*, kebijakan pelonggaran akses wisman dan mobilitas wisnus, yang telah berdampak positif pada pemulihan pariwisata, akan terus dioptimalkan dengan tetap mengedepankan keamanan di tengah belum berakhirnya pandemi. *Kedua*, penerapan disiplin protokol kesehatan dan sertifikasi *cleanliness, healthy, safety*, dan *environment sustainability* (CHSE) terus diperkuat untuk meningkatkan *confidence* wisatawan. *Ketiga*, pemberian stimulus dan insentif terus dioptimalkan untuk mendorong akselerasi pemulihan kinerja pelaku usaha pariwisata.

Optimisme pemulihan aktivitas pariwisata juga didukung daya saing pariwisata Indonesia yang meningkat. Di tengah situasi pandemi yang terjadi sejak 2020, berbagai langkah kebijakan yang tetap ditempuh untuk menopang kinerja pariwisata telah berdampak positif pada perbaikan daya saing pariwisata nasional. Pada publikasi *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF), peringkat Indonesia tercatat naik signifikan dari 44 menjadi 32. Posisi ini menempatkan Indonesia pada peringkat kedua di antara negara-negara ASEAN, setelah Singapura. Perbaikan peringkat daya saing ini terutama dipengaruhi oleh aspek dukungan kebijakan pemulihan pariwisata yang terus ditempuh, disertai upaya pengembangan dan penataan destinasi wisata yang terus berlanjut di tengah pandemi Covid-19.

Ke depan, peluang untuk memperkuat momentum pemulihan pariwisata dapat terus ditempuh di tengah

tantangan yang masih mengemuka. Dalam jangka pendek, peluang yang mengemuka dari penyelenggaraan *meeting, incentive, convention, dan exhibition* (MICE) yang terus meningkat dapat mendorong aktivitas pariwisata. Beberapa *event* besar pada 2022 seperti MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan G20 termasuk *side events*-nya, serta rangkaian acara Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 di berbagai daerah akan memberi dampak positif pada aktivitas pariwisata. Dalam jangka menengah, peluang juga mengemuka dari berlanjutnya investasi di sektor-sektor terkait pariwisata dan percepatan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) yang akan mengarah pada *quality tourism* (QT). Potensi lain bersumber dari terus berkembangnya desa wisata di berbagai daerah dan ekonomi kreatif, sejalan dengan mengemukanya tren pariwisata ke depan. Meski demikian, upaya pemulihan pariwisata diperkirakan masih menghadapi tantangan, terutama dari *return home policy* di Tiongkok dan Jepang yang masih relatif ketat. Kedua negara tersebut sebelum pandemi merupakan negara asal wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia dengan pangsa yang cukup besar. Tantangan lain berkaitan dengan operasional pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih, termasuk kecepatan peningkatan kapasitas angkutan udara yang belum sebanding dengan kenaikan permintaan.

Dengan melihat peluang dan tantangan yang masih dihadapi, sinergi dan kolaborasi kebijakan perlu terus diperkuat. Secara keseluruhan, berbagai upaya dan sinergi kebijakan yang telah dan akan terus ditempuh untuk mengakselerasi pemulihan pariwisata, dapat mendukung pencapaian target kinerja pariwisata yang telah ditetapkan pemerintah seperti kunjungan wisman 1,8 – 3,6 juta orang. Dinamika berbagai indikator terkini, termasuk mobilitas domestik dan kunjungan wisman, mengindikasikan target tersebut bahkan berpotensi untuk dapat terlampaui, sehingga akan meningkatkan pendapatan devisa pariwisata nasional.

Perkembangan Terkini dan Upaya Pemulihan Kinerja Pariwisata

Melandainya kasus Covid-19 di berbagai negara, mendorong pelonggaran restriksi. Sejumlah negara terutama di negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia, termasuk juga Indonesia, secara bertahap telah membuka pintu perbatasannya dan terus melonggarkan restriksi

perjalanan. Kebijakan pelonggaran tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan *travel demand*, meski relatif masih berada di bawah level pra pandemi. Perkembangan positif ini memberi dampak positif terhadap meningkatnya kunjungan wisman ke berbagai negara. Namun, mengemukanya kembali varian omicron mengindikasikan bahwa pandemi belum sepenuhnya usai dan masih menjadi risiko bagi proses pemulihan pariwisata ke depan. Selain itu, risiko juga mengemuka dari dinamika proses pemulihan ekonomi global yang menghadapi tantangan dari percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara dan kenaikan harga-harga, terutama pangan dan energi.

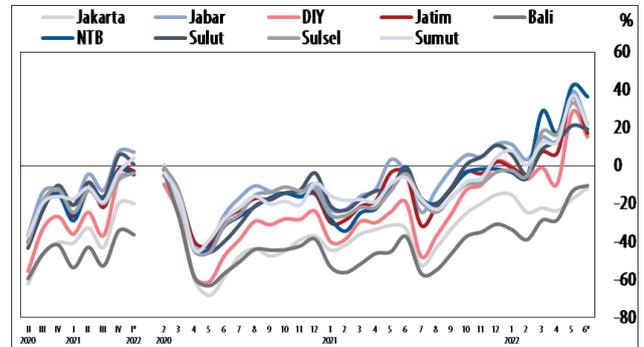
Proses pemulihan pariwisata global yang terus berlangsung juga disertai mengemukanya tren baru pariwisata yang semakin mengarah pada QT. Tren pariwisata yang mengarah pada QT ini mengemuka sebagai implikasi dari proses adaptasi dalam berwisata dari dampak pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal 2020. Preferensi berwisata saat ini lebih mengedepankan *sustainability*, termasuk dalam frekuensi bepergian, mengunjungi atraksi, dan memilih akomodasi. Sejalan dengan itu, wisatawan cenderung menghindari keramaian dalam berwisata. Penekanan berwisata juga mengarah pada aspek pengalaman otentik dan interaksi dengan budaya lokal, serta dapat memberi dampak positif pada masyarakat lokal. Secara umum, tren baru pariwisata yang mengarah pada QT memiliki empat aspek, yakni *sustainability*, *basic competitiveness*, *unique experience*, dan *high value* (Gambar III.1).



Gambar III.1. Empat Aspek Utama *Quality Tourism*

Di Indonesia, proses pemulihan pariwisata terus berlanjut, sejalan dengan melandainya kasus Covid-19 dan pelonggaran restriksi mobilitas. Pembukaan akses wisman yang telah dilakukan secara bertahap sejak Maret 2022 telah mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisman. Hal ini berdampak positif pada penerimaan devisa pariwisata. Sejalan dengan itu, penurunan level PPKM di hampir seluruh daerah telah mendorong peningkatan pergerakan wisnus, termasuk di berbagai daerah destinasi

utama. Peningkatan mobilitas semakin meningkat terutama pada periode hari besar keagamaan nasional (HBKN), seiring kebijakan pelonggaran perjalanan mudik. Indikator tingkat mobilitas masyarakat terkait pariwisata di sejumlah daerah di Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara bahkan telah melampaui periode pre-pandemi (Grafik III.1).



Sumber: Google Mobility Report, diolah

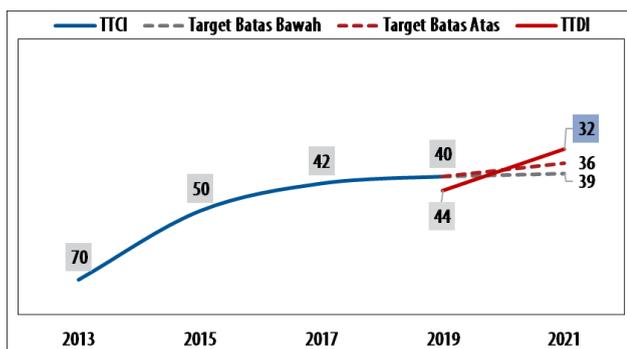
Grafik III.1. Mobilitas Masyarakat terkait Aktivitas Pariwisata di Beberapa Daerah

Berbagai langkah kebijakan ditempuh untuk memperkuat momentum pemulihan pariwisata nasional. Sejak pandemi terjadi, berbagai upaya terus diupayakan oleh pemerintah untuk memitigasi tekanan berat yang dihadapi sektor-sektor terkait pariwisata, termasuk melalui percepatan vaksinasi, serta kebijakan insentif dan stimulus. Berdasarkan hasil survei, dukungan kebijakan stimulus dan insentif melalui berbagai skema relatif dapat menopang upaya pemulihan kinerja pelaku usaha pariwisata, terutama pada usaha hotel dan restoran. Kendati demikian, ruang pemanfaatan stimulus yang telah ditempuh dapat dioptimalkan termasuk melalui percepatan realisasi anggaran⁵.

Ke depan, berbagai langkah kebijakan akan terus ditempuh untuk memastikan berjalannya proses pemulihan pariwisata. Tiga hal utama yang menjadi prioritas antara lain percepatan vaksinasi di seluruh daerah yang merupakan *necessary confidence* untuk memastikan mobilitas yang aman, penerapan disiplin protokol kesehatan (prokes) dan penguatan *tracking* dan *tracing* melalui PeduliLindungi, serta memperluas implementasi sertifikasi CHSE di berbagai wilayah untuk meningkatkan *confidence* wisatawan. Ketiga prioritas tersebut ditempuh melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah. Sebagai salah satu ilustrasi adalah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang secara aktif turut berperan dalam mendorong perluasan sertifikasi CHSE melalui dukungan alokasi APBD (*Lihat Boks 4: Dukungan Pemerintah Daerah dalam Perluasan Sertifikasi CHSE SNI di Provinsi Sumatera Barat*).

⁵ Survei Khusus Sektor Riil (SKSR) Periode Triwulan II 2022

Momentum pemulihan pariwisata didukung daya saing pariwisata nasional yang meningkat. Berbagai kebijakan pemulihan dan pengembangan pariwisata yang ditempuh pemerintah selama pandemi, telah berhasil mendorong peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. Berdasarkan *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) 2021 yang dirilis *World Economic Forum* (WEF) pada Mei 2022, daya saing pariwisata Indonesia berada ada peringkat 32, atau naik 12 peringkat dari tahun 2019 (Grafik III.2). Posisi tersebut menempatkan daya saing Indonesia berada pada peringkat tertinggi ke-2 di ASEAN, setelah Singapura. Peningkatan daya saing ini terutama didukung pilar kebijakan prioritas pariwisata dan sumber daya alam. Untuk mendorong perbaikan daya saing lebih lanjut, terdapat beberapa pilar yang perlu diperkuat karena justru mengalami penurunan peringkat, terutama pada pilar terkait keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*). Ke depan, penguatan pada aspek keberlanjutan lingkungan ini dapat ditempuh melalui pengembangan dan penataan destinasi yang lebih mengedepankan QT.



Sumber: *World Economic Forum*

Grafik III.2. Peringkat Daya Saing Pariwisata Indonesia (TTDI)

Peluang dan Tantangan Penguatan Momentum Pemulihan Pariwisata

Momentum pemulihan pariwisata ke depan dapat diperkuat dengan mengoptimalkan berbagai peluang yang mengemuka. Pelonggaran mobilitas dan akses wisman yang telah secara bertahap diperluas, dapat terus diakselerasi melalui peluang penyelenggaraan berbagai *event* berskala besar, termasuk dengan memanfaatkan berkembangnya tren '*workcation*'. Di samping itu, berlanjutnya investasi di sektor-sektor terkait pariwisata disertai upaya percepatan pengembangan dan penataan DPSP akan memperkuat kinerja pariwisata ke depan, yang lebih mengedepankan pada QT. Berkembangnya desa wisata dan ekonomi kreatif (ekraf) menjadi peluang yang juga akan memperkuat kesinambungan dan inklusivitas dari aktivitas pariwisata. Meski demikian, pemulihan pariwisata lebih lanjut setidaknya dihadapkan pada dua tantangan, yakni berkaitan dengan *return home policy* Tiongkok dan

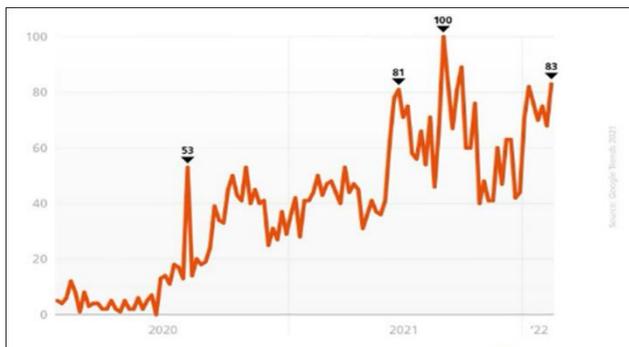
Jepang yang masih ketat, serta operasional pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih, termasuk kecepatan peningkatan kapasitas angkutan udara yang belum sebanding dengan kenaikan permintaan.

Peningkatan Penyelenggaraan MICE dan Tren "Workcation"

Penyelenggaraan event dan MICE secara nasional yang kembali meningkat sejak 2021, menopang perbaikan kinerja pariwisata. Penyelenggaraan *event* dan MICE yang kembali meningkat, terutama didorong oleh berbagai pelaksanaan *event* berskala besar yang diinisiasi oleh pemerintah. Perkembangan positif ini diperkirakan terus berlanjut, seiring bertambahnya berbagai *event* dan MICE yang telah terjadwal sepanjang 2022, termasuk rangkaian rangkaian G20 dan 110 *event* di berbagai daerah yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN). Sejalan dengan persepsi pengendalian pandemi yang semakin baik ke depan, mayoritas *event* dan MICE yang diselenggarakan diperkirakan kembali mengarah kepada kegiatan fisik (*luring*), meskipun porsi pelaksanaan dalam format *hybrid* juga akan tetap besar. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, setidaknya dua strategi yang dapat ditempuh, antara lain memastikan pelaksanaan MICE pemerintah dan internasional yang telah terjadwal, serta fasilitasi *bidding* MICE internasional. Di samping itu, fasilitasi proses perizinan secara terintegrasi di daerah, termasuk dalam hal pengawasan penerapan disiplin proses, akan dapat memberi insentif bagi peningkatan penyelenggaraan MICE.

Pada saat yang bersamaan, trend 'workcation' yang terus berkembang dapat menjadi peluang untuk peningkatan jumlah dan masa tinggal wisman. Berkembangnya tren ini tidak terlepas dari proses adaptasi terhadap pola bekerja secara *remote* di masa pandemi, didukung menguatnya konektivitas digital. Tren *workcation* ini juga dianggap sebagai evolusi dari '*bleisure*', yakni kombinasi dari perjalanan bisnis dan wisata yang sebelum pandemi telah berkembang. Berbagai survei yang dilakukan lembaga internasional memprakirakan tren *workcation* di berbagai negara akan tetap kuat ke depan. Hal ini terindikasi juga dari pencarian aktivitas terkait '*workcation*' melalui mesin perambah daring yang menunjukkan akselerasi sejak 2020 (Grafik III.3). Lebih lanjut, survei yang telah dilakukan juga menempatkan Indonesia, terutama Bali, sebagai salah satu destinasi utama pilihan untuk *workcation*, khususnya *digital nomad* (*Lihat Boks 5: Tren Digital Nomad Untuk Mendukung Pemulihan Pariwisata Bali*). Mengemukanya tren ini dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pemulihan pariwisata Indonesia ke depan, terutama untuk meningkatkan kunjungan wisman dengan *length of stay* dan lebih panjang, ditengah persepsi positif terhadap Indonesia sebagai salah satu tujuan favorit untuk '*workcation*'. Dalam

kaitan ini, rencana penerbitan skema visa *digital nomad* merupakan salah satu langkah yang dapat mengoptimalkan peluang berkembangnya trend *'workcation'* ini.

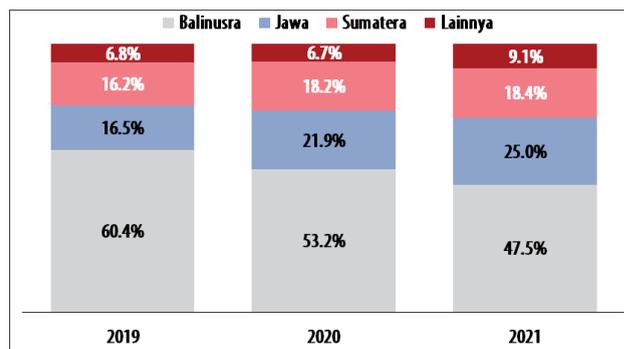


Sumber: Statista-ITB Berlin, Google Trends

Grafik III.3. Tren Pencarian Global untuk *'workcation'*

Investasi Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi

Investasi terkait pariwisata terus berlanjut di tengah pandemi yang masih berlangsung. Data BKPM menunjukkan realisasi investasi pariwisata pada 2021 mencapai Rp28,2 triliun. Kendati sedikit menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 30,9 triliun, namun tetap tergolong baik karena telah mendekati realisasi 2019 yang sebesar Rp28,6 triliun. Proyek investasi pariwisata menyebar di seluruh wilayah dengan pangsa investasi yang meningkat di Jawa dan Sumatera (Grafik III.4). Data terkini mengindikasikan realisasi investasi pariwisata diprakirakan terus berlanjut pada 2022, terutama investasi asing terkait akomodasi. Survei yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan respons pelaku usaha hotel, *travel agent*, dan penyedia souvenir akan berencana untuk merealisasikan investasinya terutama dalam bentuk mesin/peralatan, sistem informasi teknologi, dan kendaraan. Pelaku usaha di bidang restoran bahkan cenderung untuk mulai merealisasikan investasi dalam bentuk tanah/bangunan⁶. Perkembangan positif ini menunjukkan optimisme pelaku usaha dalam melihat prospek pemulihan pariwisata, dengan tetap melanjutkan investasinya. Ke depan, upaya untuk mendorong peningkatan potensi investasi lebih lanjut dapat ditempuh, antara lain dengan penyediaan akses potensi investasi sektor pariwisata yang terintegrasi, termasuk adanya dukungan insentif untuk investasi pariwisata, serta penguatan sarana-prasarana infrastruktur pendukung.



Sumber: Kementerian Investasi, diolah

Grafik III.4. Pangsa Proyek Investasi Pariwisata Berdasarkan Wilayah

Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

Pengembangan DPSP akan mendukung penguatan kinerja pariwisata ke depan. Inisiasi pengembangan DPSP yang telah dilakukan sejak 2019 dan diarahkan untuk memperkuat kinerja pariwisata ke depan, terus diakselerasi ditengah masa pandemi untuk mencapai target selesai pada 2024.⁷ Pengembangan mencakup aspek aksesibilitas, atraksi, amenitas, promosi dan pelaku (3A2P). Dari sisi aksesibilitas, upaya penyelesaian pembangunan akses jalan, bandara, dan pelabuhan/dermaga terus dipercepat. Dari sisi atraksi, kurasi berbagai atraksi lokal, pengembangan paket wisata dan *travel pattern*, serta rencana penyelenggaraan *event* terus dilakukan bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Dari sisi amenitas, pembangunan hotel, utilitas, hingga jaringan listrik dan internet terus dilanjutkan. Dari sisi pelaku, berbagai program pelatihan/sertifikasi, pendampingan, dan digitalisasi terus didorong, termasuk kepada UMKM pendukung pariwisata. Dari sisi promosi, pengembangan paket wisata, kalender *event*, *platform* digital, dan keikutsertaan dalam berbagai *travel fair* juga terus dilakukan. Dalam kaitan ini, secara khusus Bank Indonesia terus berkomitmen dalam mendukung pengembangan DPSP, terutama melalui fasilitasi pengembangan UMKM dan perluasan digitalisasi transaksi pembayaran di DPSP.

Ke depan, pengembangan dan penataan DPSP dapat memperkuat arah pengembangan QT. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia, penataan destinasi pariwisata masih perlu untuk lebih memprioritaskan pada aspek-aspek yang menjadi daya saing dasar, terutama keragaman atraksi, serta kebersihan dan keamanan⁸. Selain itu, pengembangan destinasi juga perlu disertai dukungan akomodasi yang mengedepankan ramah lingkungan,

⁶ Survei Khusus Sektor Riil (SKSR) periode Triwulan II 2022.

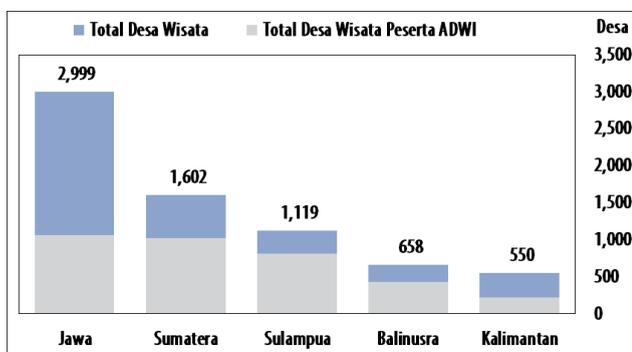
⁷ DPSP mencakup Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara).

⁸ Survei khusus untuk memetakan aspek-aspek QT pada destinasi wisata utama Indonesia dari perspektif wisman dan wisnus. Survei dilakukan pada periode Juni 2022.

dengan ditunjang fasilitas berstandar internasional. Lebih lanjut, berbagai tantangan yang mengemuka terkait percepatan penyelesaian DPSP perlu segera diatasi melalui sinergi dan kolaborasi pusat dan daerah, termasuk untuk meningkatkan *engagement* masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang telah terbangun.

Berkembangnya Desa Wisata di tengah Pandemi

Desa wisata terus berkembang di berbagai wilayah dan mendukung arah pengembangan QT. Berdasarkan data Kementerian Desa PDTT, tercatat lebih dari 6.900 desa wisata tersebar di seluruh Indonesia (Grafik III.5). Sebagian dari desa wisata tersebut berpotensi menjadi desa wisata unggulan berdasarkan kategori Anugerah Desa Wisata (ADWI), termasuk didalamnya indikator terkait keunggulan atraksi, kelembagaan, dan amenitas. Salah satu desa wisata unggulan tersebut bahkan telah menjadi desa wisata terbaik di tingkat global, yakni Desa Wisata Nglangeran (*Lihat Boks 6: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Nglangeran, Desa Wisata Dunia*). Berkembangnya desa wisata di berbagai daerah ini pada gilirannya mendukung pada penguatan aktivitas pariwisata yang berkesinambungan dan inklusif, serta sejalan dengan pengembangan QT ke depan. Pengembangan desa wisata juga terus diarahkan untuk mendukung pengembangan DPSP (*Lihat Boks 7: Prospek Pengembangan Desa Wisata Marinsow sebagai Pendukung DPSP Likupang*).



Sumber: Kemenparekraf dan Kemendes PDTT, diolah
Grafik III.5. Jumlah Desa Wisata di Indonesia per Wilayah

Pengembangan desa wisata terus diakselerasi melalui berbagai strategi. Pemerintah menempuh sejumlah strategi untuk mengembangkan desa wisata dengan pola yang diselaraskan dengan tingkat kemajuannya. Secara umum, strategi pengembangan desa wisata ditempuh melalui empat hal, yakni strategi ko-kreasi dan pendampingan, termasuk didalamnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait hingga melibatkan perguruan tinggi dan BUMN; sertifikasi dan monitoring; peningkatan promosi dengan penguatan *branding* dan

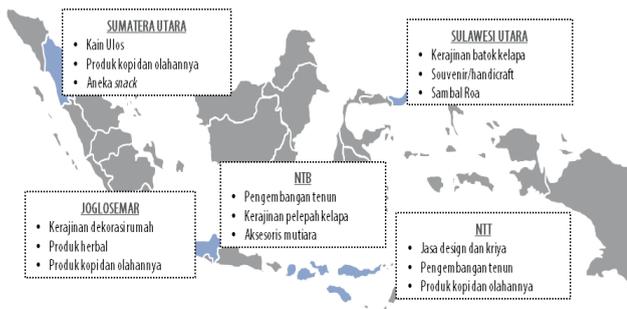
pemanfaatan *platform digital*; serta pengembangan model bisnis yang dapat memastikan pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia turut mendorong pengembangan desa wisata terutama melalui fasilitasi pengembangan UMKM dan digitalisasi transaksi pembayaran. Lebih lanjut, pemberdayaan komunitas lokal dan kelembagaan desa menjadi kunci untuk mengakselerasi peningkatan peran desa wisata dalam mendorong pariwisata nasional.

Potensi Ekonomi Kreatif untuk Pariwisata yang Inklusif

Potensi ekonomi kreatif (ekraf) dapat terus berkembang dan mendukung aktivitas pariwisata di tengah tantangan berat dari pandemi. Data Kemenparekraf menunjukkan kontribusi ekraf terhadap perekonomian pada 2021 mencapai 7,02% PDB. Data yang sama menunjukkan terdapat lebih dari 8,2 juta usaha kreatif di Indonesia, dengan dominasi pada sub sektor usaha kuliner, fesyen, dan kriya. Ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas pariwisata, termasuk 38 subsektor lainnya seperti seni rupa, seni pertunjukan, musik, film, dan penerbitan⁹. Di tengah masa pandemi, berkembangnya subsektor ekonomi kreatif tersebut tidak terlepas dari dukungan pesatnya adopsi teknologi di masyarakat. Potensi ekraf yang terus berkembang melalui berbagai usaha sosial-kreatif dan partisipasi masyarakat lokal pada gilirannya berdampak positif pada aktivitas pariwisata yang inklusif.

Ke depan, strategi pengembangan ekraf dan pariwisata terus ditempuh secara terintegrasi. Dalam implementasinya, hal ini antara lain ditempuh melalui penguatan konten dan kemasan pariwisata dengan dukungan ekraf, program pendampingan dan penciptaan produk ekraf di destinasi wisata, pemberian bantuan insentif bagi pelaku usaha ekraf, serta pembentukan Komite Ekonomi Kreatif (KEK) untuk merancang program pengembangan ekraf serta mengoordinasi aspirasi dari seluruh *stakeholders* ekraf di daerah. Upaya mengoptimalkan potensi ekraf di destinasi wisata juga terus ditempuh melalui inisiatif pengembangan *creative hub* di berbagai daerah (*Lihat Boks 8: Singkawang Creative Hub Untuk Penguatan Ekraf Pendukung Cross Border Tourism*). Lebih lanjut, dukungan pengembangan ekraf juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengembangan klaster UMKM ekraf di berbagai destinasi wisata, termasuk di wilayah DPSP (Gambar III.2). Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperluas implementasi QRIS untuk mendukung efisiensi transaksi produk dan jasa ekraf di destinasi wisata.

⁹ Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

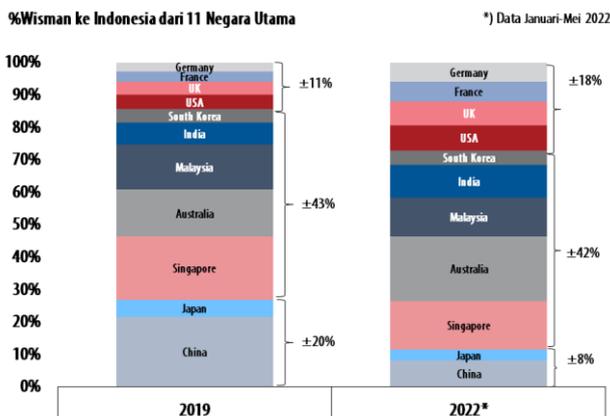


Sumber: Bank Indonesia

Gambar III.2. Klaster UMKM Ekraf Binaan Bank Indonesia di 5 Wilayah DPSP

Tantangan Return Home Policy Tiongkok dan Jepang yang Masih Ketat

Momentum pemulihan wisman dihadapkan pada tantangan dari masih ketatnya *return home policy* di beberapa negara asal wisman utama Indonesia, terutama Tiongkok dan Jepang. Kebijakan *Zero Covid Policy* yang ditempuh Tiongkok untuk mengendalikan kenaikan kasus Covid-19, menahan preferensi masyarakatnya untuk berwisata ke luar Tiongkok. Kebijakan yang masih cukup ketat juga ditempuh Jepang, untuk terus menekan penyebaran Covid-19, kendati saat ini telah ada upaya untuk mulai melonggarkan restriksi dengan penyesuaian aturan masuk berdasarkan kategori tingkat risiko Covid-19 negara asal pelaku perjalanan luar negeri. Masih ketatnya *return home policy* di Tiongkok dan Jepang menyebabkan pangsa kunjungan wisman pada dua negara tersebut jauh menurun, dibandingkan periode pra-pandemi. Pada saat ini, wisman dari Tiongkok dan Jepang hanya menyumbang 8% dari seluruh kunjungan wisman. Jauh menurun dibandingkan pra pandemi yang mencapai 20% (Grafik III.6). Ke depan, kondisi ini diperkirakan masih berlanjut sebagaimana terindikasi dari *booking* tiket pesawat dari kedua negara tersebut yang masih minim hingga pertengahan 2023.



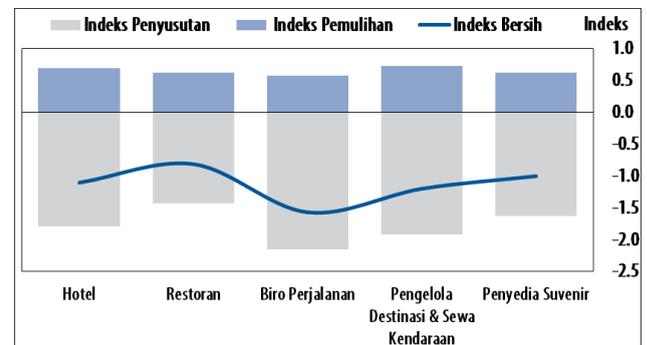
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.6. Pangsa Wisman Berdasarkan Negara Asal

Untuk mengoptimalkan pembukaan pariwisata ke depan, penguatan promosi pembukaan pariwisata secara aman dapat terus ditempuh. Penguatan promosi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peluang dari perubahan pola negara asal wisman yang masuk ke Indonesia. Selain Australia dan ASEAN yang merupakan negara asal wisman utama Indonesia, saat ini wisman yang berasal dari negara-negara seperti India, Asia Tengah, dan Eropa juga mulai menunjukkan perkembangan yang meningkat. Untuk mengoptimalkan pergeseran pola negara asal wisman ini, maka upaya penguatan strategi promosi di negara-negara asal wisman 'non-konvensional' dapat dilakukan. Di samping itu, perluasan subyek negara penerima *visa on arrival* dan bebas visa kunjungan dapat diperluas secara bertahap, dengan tetap memerhatikan tingkat risiko Covid-19.

Tantangan Operasional Pelaku Usaha yang Belum Sepenuhnya Pulih

Kinerja operasional pelaku usaha belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, ditengah proses pemulihan yang tengah berjalan. Hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan penggunaan tenaga kerja oleh pelaku usaha belum kembali ke tingkat pada masa pra pandemi¹⁰. Hal ini terutama terjadi pada pelaku usaha biro perjalanan dan pengelola destinasi. Tiga faktor yang menyebabkan masih rendahnya penggunaan tenaga kerja, yakni kinerja usaha/keuangan yang masih di bawah level 2019, perampangan usaha/proses bisnis yang ditempuh pelaku usaha sebagai upaya memitigasi dampak pandemi pada kinerja usaha, serta meningkatnya penggunaan teknologi informasi/digital dalam operasional usaha. Kendati demikian, hasil survei juga mengindikasikan pemulihan yang relatif lebih cepat terjadi pada kelompok pelaku usaha restoran, hotel, dan penyedia souvenir (Grafik III.7).



Sumber: Survei Khusus Sektor Riil (SKSR), Bank Indonesia

Grafik III.7. Indeks Pemulihan Penjualan Pelaku Usaha Pariwisata

Untuk mengoptimalkan kinerja usaha, adaptasi digital menjadi opsi utama yang akan ditempuh pelaku usaha

¹⁰ Survei Khusus Sektor Riil (SKSR) periode Triwulan II 2022

dalam merespons kenaikan permintaan. Hasil survei yang sama juga menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha pariwisata sangat siap dalam penerapan implementasi protokol Covid-19/sertifikasi CHSE dan pemberian vaksinasi kepada tenaga kerja. Lebih lanjut, pelaku usaha cenderung akan meningkatkan penggunaan teknologi digital dan fleksibilitas operasional dalam merespons kenaikan permintaan. Di sisi lain, aspek modal kerja, peningkatan aset, dan tenaga kerja masih menjadi kendala bagi pelaku usaha. Pelaku usaha menekankan pada keyakinan terhadap kepastian penanganan pandemi sebagai faktor utama bagi pemulihan kinerja usahanya ke depan, disamping juga dukungan terhadap pembiayaan.

Percepatan pemulihan pariwisata nasional juga dihadapkan pada tantangan terbatasnya kapasitas angkutan udara dalam merespons kenaikan permintaan.

Kondisi ini setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, banyaknya tenaga kerja penerbangan yang telah beralih profesi, termasuk dalam upaya untuk efisiensi akibat dampak pandemi. Kedua, kenaikan biaya operasional terutama akibat harga avtur yang meningkat signifikan. Terkait hal ini, pemerintah telah memberikan ruang bagi maskapai untuk menerapkan *fuel surcharge* sejak April 2022 untuk menopang kendala beban operasional maskapai. Ketiga, terbatasnya ketersediaan armada akibat pengembalian kepada pihak *lessor*, serta antrean di fasilitas MRO. Saat ini, jumlah pesawat yang beroperasi diperkirakan hanya sekitar 63% dari sebelum pandemi dengan frekuensi penerbangan yang juga masih terbatas. Lebih lanjut, dengan frekuensi penerbangan yang belum sepenuhnya pulih, jam operasional mayoritas bandara juga masih terbatas. Untuk mendorong peningkatan kapasitas angkutan udara ini, beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam jangka pendek antara lain mengoptimalkan rotasi penerbangan dengan mempertimbangkan kemampuan maskapai dan bandara, serta peninjauan berkala atas skema *fuel surcharge* dengan disertai upaya untuk menyeimbangkan frekuensi rute dan konektivitas daerah-destinasi wisata.

Prospek dan Arah Penguatan Momentum Pemulihan Pariwisata Ke Depan

Ke depan, prospek pemulihan pariwisata diperkirakan terus berlanjut, seiring dengan pembukaan pariwisata yang lebih luas. Dinamika perkembangan terkini yang menunjukkan berlanjutnya momentum pemulihan pariwisata, mengindikasikan jumlah kunjungan wisman diperkirakan dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya yakni dalam kisaran 1,8-3,6 juta orang. Perkembangan positif ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap membaiknya penerimaan devisa pariwisata. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat didukung pelonggaran restriksi perjalanan domestik juga akan menopang peningkatan aktivitas pariwisata ke depan. Berbagai sinergi dan dukungan kebijakan yang ditempuh selama ini terus diperkuat untuk mengakselerasi pemulihan pariwisata.

Momentum pemulihan pariwisata dapat terus diperkuat, setidaknya pada lima aspek dengan percepatan vaksinasi sebagai *necessary condition*.

Pertama, melanjutkan dan mengoptimalkan pelonggaran wisman dan wisnus, termasuk dengan langkah-langkah untuk mendorong percepatan pemulihan kapasitas angkutan udara, serta secara bertahap terus menambah subyek negara penerima *visa on arrival* dan bebas visa kunjungan. *Kedua*, mempercepat pengembangan DPSP dengan lebih berorientasi QT dan peningkatan *engagement* masyarakat lokal dalam memelihara fasilitas yang telah terbangun, serta dukungan perluasan digitalisasi dan fasilitasi pengembangan UMKM. *Ketiga*, mendorong peningkatan dan pemerataan MICE, termasuk dengan memastikan terselenggaranya berbagai *event* skala besar yang telah terjadwal, serta fasilitasi *bidding* MICE internasional. *Keempat*, mempercepat pemulihan pelaku usaha antara lain dengan mengoptimalkan dukungan insentif, pendampingan, serta mengoptimalkan digitalisasi. *Kelima*, mendorong promosi pembukaan pariwisata Indonesia yang lebih luas.

Dukungan Pemerintah Daerah dalam Perluasan Sertifikasi CHSE SNI di Provinsi Sumatera Barat

Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap penurunan kinerja Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Sejalan dengan kondisi yang dialami oleh berbagai wilayah, kinerja pariwisata Sumatera Barat juga tidak terlepas dari pengaruh pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan wisman mengalami penurunan cukup dalam, seiring dengan penerapan kebijakan restriksi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hingga periode Mei 2022, belum tercatat lagi adanya kunjungan wisman ke wilayah Sumatera Barat. Di sisi lain, jumlah kunjungan wisnus berangsur terus membaik dan menopang kinerja pariwisata Sumatera Barat. Kondisi ini juga tercermin dari tingkat penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang secara bertahap kembali membaik. Berbagai langkah upaya terus ditempuh melalui sinergi pusat dan daerah untuk menopang tetap berjalannya aktivitas pelaku usaha pariwisata selama pandemi, disertai penerapan protokol kesehatan yang baik, hingga dapat terus mendukung proses pemulihan pariwisata.

Salah satu upaya mendukung pemulihan pariwisata Sumatera barat ditempuh melalui perluasan CHSE untuk meningkatkan *confidence* wisatawan. Sejalan dengan kebijakan di tingkat Pusat yang telah meningkatkan status sertifikasi CHSE menjadi CHSE SNI, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut memberikan dukungan dalam rangka

mendorong pemulihan pariwisata, melalui kebijakan perluasan dan pelaksanaan sertifikasi CHSE SNI dengan dukungan anggaran dari APBD pada tahun 2022. Program perluasan CHSE ini diadopsi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dari program fasilitasi sertifikasi CHSE yang diberikan oleh Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata pada tahun 2020-2021. Kebijakan yang ditempuh ini sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya program unggulan pembangunan pariwisata, melalui pengembangan destinasi berkelas dunia dan pengembangan daya tarik wisata unggulan (DTWU), serta sebagai upaya pemulihan pariwisata di Sumatera Barat. Untuk tahun 2022, target perluasan sertifikasi CHSE SNI yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan meliputi 19 DTWU, 10 *homestay* dan 30 desa wisata di Sumatera Barat. Pelaksanaan sertifikasi CHSE SNI ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang dipilih melalui mekanisme tender, dengan seluruh biaya menjadi tanggungan APBD Provinsi Sumatera Barat. Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan perluasan sertifikasi CHSE SNI sebesar Rp626 juta yang merupakan anggaran belanja barang dan jasa, dengan rincian Rp126,5 Juta untuk Sertifikasi CHSE SNI mandiri 19 DTWU, Rp100 juta untuk Sertifikasi CHSE SNI mandiri 10 *Homestay* dan sisanya Rp399,6 juta untuk Sertifikasi CHSE SNI mandiri 30 desa wisata.

Tren *Digital Nomad* untuk Mendukung Pemulihan Pariwisata Bali

Pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan dan adaptasi gaya hidup, termasuk pola bekerja. Di masa pandemi, pola bekerja yang sebelumnya dilaksanakan dengan *Work From Office* (WFO) berubah menjadi bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Tren WFH kemudian berkembang menjadi *Work From Anywhere* (WFA), sejalan dengan pelonggaran peraturan restriksi di berbagai negara. Perkembangan konsep WFA tersebut, mendorong negara-negara di seluruh dunia, khususnya yang bergantung pada sektor pariwisata, untuk berlomba meningkatkan daya tarik destinasi wisatanya bagi para pekerja jarak jauh atau yang umum dikenal dengan *digital nomad*.

***Digital nomad* diperkirakan memberikan kontribusi terhadap devisa wisata dengan waktu tinggal yang lebih panjang dan pengeluaran yang cukup tinggi.** Berdasarkan survei yang dilakukan lembaga internasional kepada 4.000 pelaku '*workcation*', rata-rata pengeluaran *digital nomad* di daerah tujuan sebesar \$1.875 per orang per bulan¹¹. Potensi ini mendorong banyak negara, khususnya yang memiliki ketergantungan cukup besar pada aktivitas pariwisata, menerapkan skema *digital nomad visa*. Salah satu kebijakan yang banyak dikembangkan di negara Eropa dan Asia Tenggara adalah perluasan kebijakan visa kerja jangka pendek agar dapat mencakup para *digital nomad*. Program visa tersebut umumnya menghabiskan biaya sekitar \$1.000 per orang atau setara dengan Rp15 juta dan membebaskan pemegang visa dari pajak penghasilan lokal untuk masa tinggal minimal enam bulan hingga dua tahun. Selain itu, pengurusan visa *digital nomad* juga diiringi dengan persyaratan pendapatan dan pekerjaan untuk memastikan pemegang visa mampu menghidupi diri tanpa mengambil lapangan pekerjaan lokal.

Bali termasuk dalam destinasi favorit bagi para pelaku

'workcation' atau digital nomad. Mengacu pada survei yang dilakukan Nomadlist, terdapat tiga daerah di Bali yang masuk dalam 100 destinasi terfavorit bagi *digital nomad* di dunia (Tabel III.1). Hal ini tidak terlepas dari aspek biaya hidup yang terjangkau, pilihan destinasi wisata yang beragam, dan indeks keamanan yang tinggi. Meski demikian, hasil survei tersebut menunjukkan tantangan terkait kecepatan internet dan minimnya fasilitas kesehatan menahan kenaikan peringkat Bali lebih lanjut.

Tabel III.1. Peringkat Digital Nomad Skor

Peringkat	Destinasi	Skor
1	Warsaw, Poland	4.89
2	Gran Canaria, Canary Islands	4.89
3	Da Nang, Vietnam	4.82
4	Lisbon, Portugal	4.81
5	Belgrade, Serbia	4.76
11	Seseh, Bali	4.64
40	Ubud, Bali	4.29
71	Seminyak, Bali	4.14

Sumber: Nomadlist

Tren '*workcation*' di Bali diperkirakan mampu mendorong pemulihan pariwisata Bali. Dengan pilihan visa yang tersedia saat ini, durasi waktu tinggal yang memungkinkan di Bali cenderung terbatas untuk melaksanakan '*workcation*', yaitu maksimal hanya 180 hari (3 bulan) dengan biaya kepengurusan visa sekitar \$50 per orang atau setara dengan Rp750 ribu. Kondisi ini tentunya akan membatasi Bali sebagai pilihan destinasi oleh *digital nomad* untuk tinggal dalam jangka waktu yang panjang. Ke depan, rencana skema *digital nomad* dengan opsi jangka waktu tinggal yang lebih panjang, diperkirakan mampu untuk mendorong pemulihan pariwisata Bali lebih lanjut.

¹¹ Sumber: ABrotherAbroad.com

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Nglanggeran, Desa Wisata Dunia

Desa Nglanggeran merupakan desa wisata yang dinobatkan sebagai desa wisata terbaik dari UNWTO pada tahun 2021. Sejalan dengan itu, Desa Nglanggeran juga menjadi juara kategori desa Mandiri Inspiratif dari Kemenparekraf pada tahun 2021. Salah satu atraksi yang menarik dari desa wisata ini adalah gunung api Purba, dengan struktur batuan besar dan menjadi *icon* wisata. Selain itu, karena melimpahnya produksi kakao, desa wisata ini juga menawarkan wisata kuliner berbasis pengolahan coklat (hulu-hilir) sebagai bagian dari paket wisata. Pengembangan atraksi yang disuguhkan dalam desa wisata ini dilakukan oleh komunitas warga desa setempat, sebagai kekuatan bersama dalam mendukung inovasi atraksi-atraksi yang terintegrasi dan memanjakan wisatawan. Namun demikian, banyaknya wisatawan yang berkunjung, baik wisnus maupun wisman, patut diwaspadai. Potensi vandalisme dan perusakan cagar alam maupun budaya menjadi salah satu risiko. Oleh karena itu, aspek edukasi kepada wisatawan perlu menjadi strategi ke depan.

Dari sisi Akses, Desa Nglanggeran dapat dijangkau melalui jalur darat dari Yogyakarta maupun Wonosari. Meski jalanan yang dilalui cukup bagus, namun belum terdapat moda transportasi terintegrasi yang dapat memfasilitasi wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, karena terletak di dalam pedesaan dan perbukitan, jaringan sinyal yang tersedia juga masih terbatas untuk beberapa *provider*. Untuk menikmati seluruh atraksi yang terintegrasi, wisatawan dapat menginap di *homestay*, yang banyak tersedia di sekitar desa wisata dan juga telah dapat dipesan melalui aplikasi salah satu *online travel agent* (OTA). Wisatawan dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi OTA maupun pembayaran dengan menggunakan QRIS di *homestay*.

Pencapaian dan keberhasilan dalam pengelolaan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat ini tidak terlepas dari kolaborasi pentahelix. Kolaborasi dan sinergi yang kuat antara kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Pemerintah Daerah, Bank Indonesia akademisi, pelaku usaha, dan media, menjadi salah satu faktor keberhasilan pengelolaan desa wisata ini, dengan memaksimalkan

potensi alam yang indah dan mengoptimalkan produksi kakao yang berlimpah untuk menghasilkan aneka produk coklat yang inovatif. Keberhasilan dari pengelolaan desa wisata ini juga dipengaruhi faktor pemberdayaan masyarakat lokal sehingga mendukung keberlanjutan pengembangannya ke depan. Peran digitalisasi melalui optimalisasi penggunaan OTA turut menjadi strategi penting dalam mendatangkan wisatawan, sehingga tak mengherankan apabila pendapatan desa wisata Nglanggeran pernah mencapai nilai tertingginya pada 2019 yaitu Rp3,27 miliar.

Keberhasilan pengembangan desa wisata ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat bersama berbagai pemangku kepentingan. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok yang terdiri dari kelompok tani, kelompok kuliner purba rasa, pokdarwis Nglanggeran serta pemuda desa setempat, yang berkolaborasi menghasilkan aneka produk makanan/jajanan berupa dodol, keripik singkong, keripik ikan dan lanting. Pengembangan desa ini juga mengoptimalkan potensi kakao dengan mengolah 80% kakao produksi lokal menjadi produk turunan kakao, seperti coklat dan makanan berbahan dasar coklat lainnya. Pengolahan kakao tersebut sukses dilakukan dengan bantuan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Yogyakarta, Dinas Perhutanan dan Perkebunan Gunung Kidul. Selain pendampingan, bantuan teknis juga diberikan baik dalam bentuk fasilitasi mesin pengolahan, ruang pameran, maupun sarana prasarana lainnya. Pembangunan griya coklat Nglanggeran dilakukan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja bagi SDM lokal. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi, aktivasi kegiatan dan penjualan yang berbasis platform digital. Ke depan, penguatan infrastruktur, seperti integrasi moda transportasi yang terjangkau, akses internet yang stabil, diperlukan untuk mendukung pengembangan desa wisata mengoptimalkan potensinya sebagai destinasi wisata unggulan daerah.

Prospek Pengembangan Desa Wisata Marinsow Sebagai Pendukung DPSP Likupang

Desa Wisata Marinsow merupakan Desa Wisata Kategori Maju yang dikembangkan sebagai pendukung DPSP Likupang. Saat ini telah terdapat 18 desa wisata yang berada di Kabupaten Minahasa Utara, di lokasi DPSP Likupang berada, salah satu diantaranya adalah Desa Wisata Marinsow. Desa Wisata Marinsow termasuk dalam kategori Desa Wisata Alam, dengan kriteria tahapan Maju atau memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah dapat mengelola wisata dengan baik dan memiliki atraksi yang dikenal banyak orang. Desa wisata ini juga memiliki keunggulan dari letaknya yang strategis karena dekat dengan pusat KEK Likupang dan berada di pertemuan jalur akses dari Kota Manado dan Kota Bitung. Untuk mengoptimalkan hal ini, pemerintah terus mempercepat pembangunan sejumlah fasilitas akses menuju Likupang, diantaranya Jalan Marinsow yang menuju Pantai Pulisan (pusat KEK Likupang) dan Pantai Paal.

Pengembangan infrastruktur dan digitalisasi amenities di Desa Wisata Marinsow berjalan secara progresif. Pemerintah terus mendorong pengembangan amenities, antara lain melalui program Sarana Hunian Wisata (Sarhunta) dengan merevitalisasi 263 unit *homestay* di Kawasan Likupang, termasuk Desa Wisata Marinsow. Pembangunan dukungan teknologi informasi, air bersih dan listrik terus dilakukan, melalui pembangunan 12 *Base Transceiver Station* (BTS) di Kawasan Likupang, penyediaan air baku tahap 1 dan penyediaan listrik ke pulau dan wilayah

sekitarnya. Digitalisasi sistem pembayaran di Kawasan wisata tersebut juga terus dilakukan oleh Bank Indonesia bersama perbankan daerah dan pemerintah daerah, melalui perluasan akseptasi QRIS hingga lebih dari 300 *merchant* di kawasan wisata pantai, hotel, pasar tradisional, *homestay*, dan UMKM di Marinsow.

Atraksi mengandalkan wisata alam pantai dan olahraga air. Saat ini, fokus pengembangan atraksi di Kawasan likupang sudah berkembang ke arah olahraga air. Pulau Bangka menjadi fokus untuk pengembangan atraksi wisata bawah laut dengan 24 spot *diving* utama. Sementara itu olahraga air pantai dikembangkan di kawasan pantai, termasuk pantai Paal di Marinsow melalui olahraga *speed boat* dan *banana boat*.

Aspek pelaku dan promosi di sekitar Likupang didukung oleh komitmen BUMDes, Pokdarwis dan lembaga terkait aktivitas wisata. Desa Wisata Marinsow saat ini telah memiliki BUMDes Sumber Berkat yang mengelola destinasi wisata Pantai Paal. Sejalan dengan itu, upaya untuk terus meningkatkan literasi dan edukasi wisata bagi masyarakat sekitar terus dilakukan, melalui Pokdarwis dan Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sulawesi Utara. Sementara itu, penguatan promosi juga telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dalam pembuatan paket perjalanan wisata dan promosi wisata, termasuk melalui kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia.

Singkawang *Creative Hub* Untuk Penguatan Ekraf Pendukung *Cross Border Tourism*

Pariwisata perbatasan atau *cross border tourism* mampu memberikan warna baru bagi penguatan pariwisata ke depan. Kalimantan khususnya Kalimantan Barat sebagai daerah *cross border tourism* menjadi salah satu daya tarik atraksi wisata terutama bagi wisman asal Malaysia. Sebelum pandemi, berbagai festival telah diselenggarakan untuk menjaring wisman, seperti Festival Cap Go Meh. Pengembangan *cross border tourism* diarahkan untuk dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah, termasuk melalui integrasinya dengan pengembangan ekonomi kreatif.

Kota Singkawang memiliki banyak potensi ekraf yang bisa dikembangkan. Kota Singkawang merupakan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki pangsa pelaku ekraf terbesar ketiga, setelah Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya. Komunitas pelaku ekraf telah berkembang di Kota Singkawang, didukung dengan kekayaan budaya dan tradisi, serta potensi wisata yang menjadi peluang bagi tumbuhnya usaha kreatif dari masyarakat. Hal ini mendorong Pemkot Singkawang membentuk *Singkawang Creative Hub* sebagai wadah edukasi, pengembangan, dan promosi bagi pelaku ekraf. Program ini juga didukung Kemenparekraf dan pihak swasta. Pengembangan *creative hub* diarahkan untuk mengakselerasi usaha ekraf yang akan memperkuat aktivitas pariwisata di daerah, termasuk melalui usaha karya seni lukis, kain tenun ikat, keramik dan gabah, kerajinan kayu, *ecoprint*, fotografi, film/video, dan aksesoris.

Sepanjang tahun 2021, berbagai kegiatan *Singkawang Creative Hub* dilakukan untuk membantu pemulihan kinerja ekraf ditengah pandemi. *Soft launching* komunitas ini dirangkai dengan pameran ekonomi kreatif bertajuk "Habitus" pada April 2021, dengan melibatkan seniman perorangan maupun kelompok masyarakat. Selain itu, telah dilakukan *Bazar Art* dengan tema "*Mindful*" pada bulan

Agustus 2022, yang berfokus pada penjualan ragam karya seni dan peningkatan *softskill* bagi pelaku ekraf melalui sejumlah kegiatan *workshop*. Beberapa kegiatan pameran ekraf juga tetap dilakukan, antara lain melalui ODE *Exhibitor* pada bulan Oktober 2021 dan Bazar Akhir Tahun "Supernova" pada bulan Desember 2021. Pemkot Singkawang terus mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi tempat pemasaran produk ekraf, termasuk kuliner, musik, dan seni pertunjukan bernuansa budaya. Namun, regulasi pendukung dan peningkatan kualitas SDM, serta alokasi anggaran masih perlu menjadi perhatian dalam mendukung konsistensi pengembangan ekraf dengan mengedepankan komunitas.

Pengembangan industri kreatif di Kota Singkawang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Dukungan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkot Singkawang dan pihak swasta pada 2019 untuk pembinaan, pendampingan, dan bantuan peralatan kepada pelaku ekraf. Program ini telah berhasil mengembangkan industri produk *ecoprint* oleh masyarakat di Desa Liposos, Singkawang yang dinamakan "Ruang Terampil". Ruang Terampil ini merupakan komunitas pengembangan produk *ecoprint* yang memberdayakan penyintas kusta di bawah bimbingan komunitas Craftulistiwa melalui *Sepatokimin Initiative* dan berkerjasama dengan berbagai *brand* lokal (seperti Brodo dan Panna). Produk yang dihasilkan adalah sepatu *Vantage Eco Print Edition* yang dikerjakan oleh perajin lokal di Desa Liposos dengan menggunakan material kanvas *ecoprint* yang telah dipasarkan secara digital, baik melalui media sosial maupun platform *e-commerce*. Selain itu, dukungan PLN melalui fasilitasi bantuan senilai Rp 57 juta kepada komunitas pengrajin batik Kota Singkawang, berupa peralatan batik elektrik maupun bahan baku membuat, seperti kain, lilin, dan perbaikan ruang galeri.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Solikin M. Juhro

Koordinator Penyusun

IGP Wira Kusuma
M. Abdul Majid Ikram

Tim Penulis

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Kantor Perwakilan BI Prov. Sumatera Utara
Kantor Perwakilan BI Prov. Jawa Timur
Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan
Kantor Perwakilan BI Prov. Bali
Kantor Perwakilan BI Prov. Sulawesi Selatan



BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350 – Indonesia www.bi.go.id